



Tinjauan Kondisi Makro Sosial Budaya KABUPATEN PANDEGLANG 2018



**Dinas Komunikasi, Informatika, sandi dan statistik
Kabupaten Pandeglang**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya publikasi "**Tinjauan Kondisi Makro Sosial Kabupaten Pandeglang Tahun 2018**" dapat diterbitkan. Publikasi ini merupakan hasil kerjasama Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pandeglang.

Publikasi buku ini berisi analisis terhadap data atau indikator sosial dan budaya seperti kependudukan, kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan.

Keberadaannya diharapkan dapat menjadi referensi baik kemanfaatan data maupun indikator sosial budaya untuk keperluan perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Saya sangat berharap publikasi ini bisa menjadi acuan dalam hal data dan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap upaya pembangunan di Kabupaten Pandeglang.

Kami menyadari publikasi buku ini masih jauh dari sempurna segala saran dan masukan kami harapkan untuk perbaikan publikasi sejenis pada masa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan publikasi ini. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat.

Pandeglang, Juli 2018

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, SANDI DAN STATISTIK
KABUPATEN PANDEGLANG

YAHYA GUNAWAN KASBIN, S.Sos
NIP. 19671127 198801 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	ix
Bab I. Pendahuluan	1
1.1 Maksud dan Tujuan	2
1.2 Sumber Data	3
1.3 Konsep dan Definisi	5
1.4 Sistematika Penulisan	7
Bab II. Kependudukan	11
2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	12
2.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk	15
2.3 Struktur Umur	20
2.4 Keluarga Berencana	24
Bab III. Kesehatan	29
3.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk.....	30
3.2 Pemberian ASI, Imunisasi dan Gizi Balita .	33
3.3 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan	37
Bab IV. Pendidikan	45
4.1 Tingkat Pendidikan.....	46
4.2 Tingkat Partisipasi Sekolah	51
4.3 Fasilitas Pendidikan	57
<i>Tinjauan Kondisi Makro SosialBudaya Kabupaten Pandeglang 2018</i>	iii

Bab V. Ketenagakerjaan	61
5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63
5.2 Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan	69
5.3 Jumlah Jam Kerja	77
Bab VI. Perumahan	79
Bab VII. Taraf Kesejahteraan dan Pola Konsumsi	85
7.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	87
Bab VIII. Pengeluaran	91
Bab IX. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	95
9.1 Indeks Kesehatan	97
9.2 Indeks Pendidikan	100
9.3 Indeks Tingkat Daya Beli	106
9.4 Indeks Pembangunan Manusia	108
Bab X. Teknologi Informasi Dan telekomunikasi	111
Bab XI. Penutup	115

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan <i>Sex Ratio</i> di Kabupaten Pandeglang, Tahun 1990-2017	14
2.2 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pandeglang Menurut Kecamatan Tahun 2017	18
2.3 Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2017	21
2.4 Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2017	22
2.5 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah kawin dan Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Jenis Alat/Cara di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2015-2017	24
3.1 Jumlah Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Pandeglang, Tahun 2015-2017	31
3.2 Angka Kesakitan dan Rata-rata Lamanya Sakit Penduduk Kabupaten Pandeglang, Tahun 2017	32
3.3 Persentase Penduduk Umur 0-23 Bulan (Baduta) yang Pernah Diberi ASI dan Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan) di Kabupaten Pandeglang,	

DAFTAR TABEL

Tahun 2016-2017	34
3.4 Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Pernah mendapat Imunisasi menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2017	36
3.5 Jumlah dan Persentase Balita Menurut Status Gizi Di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2015-2017.....	37
3.6 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan menurut Penolong Persalinan di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2016-2017.....	39
3.7 Persentase Penduduk Menurut Alasan Utama Tidak Berobat Jalan di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2016-2017.....	40
3.8 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2016-2017	42
4.1 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut kemampuan Membaca dan Menulis dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2015-2017.....	47
4.2 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Pandeglang, Tahun 2015-2017 ..	49
4.3 Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2017	50
4.4 Jumlah Sekolah, Guru, Murid dan Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Sekolah di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2017	58
5.1 Indikator Ketenagakerjaan Penduduk Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 dan	

2017.....	65
5.2 Indikator Ketenagakerjaan Penduduk Kabupaten Pandeglang Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017	68
5.3 Komposisi Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2017	73
5.4 Komposisi Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2015 dan 2017	75
5.5 Komposisi Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2017	76
5.6 Persentase Penduduk Yang Bekerja dan Pengangguran Menurut Pendidikan di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2017	78
6.1 Persentase Rumah Tinggal Menurut Fasilitas Perumahan di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2015-2017	83
7.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pandeglang, Tahun 1999-2017 ...	88
8.1 Pengeluaran Rata-rata per Kapita per Bulan Penduduk Kabupaten Pandeglang, Tahun 2016-2017	93
9.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan Komponen IPM di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2017	100
9.2 Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2015-2017	105
9.3 Penggolongan skor/nilai IPM	109
10.1 Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas menurut Karakteristik Penggunaan Teknologi	

DAFTAR TABEL

	Informasi di Kabupaten Pandeglang Tahun 2017	112
10.2	Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas menurut apa saja yang digunakan untuk mengakses internet di Kabupaten Pandeglang Tahun 2017	113
10.3	Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas menurut untuk apa saja mengakses internet di Kabupaten Pandeglang Tahun 2017	114

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2017	23
2.2 Distribusi Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Umur Perkawinan Pertama, Tahun 2015-2017	27
4.1 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2016-2017	53
4.2 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2016-2017	55
4.3 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2016-2017	56
5.1 Indikator Ketenagakerjaan Penduduk Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 dan 2017	66
5.2 Komposisi Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017	70
7.1 Jumlah Penduduk Miskin dan Nilai Garis Kemiskinan di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2010-2017	90

DAFTAR GAMBAR

9.1	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten, Tahun 2011-2017	110
-----	--	-----

.....

Sebagai usaha mewujudkan tujuan utama pembangunan, yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah Kabupaten Pandeglang pada saat ini berusaha melakukan segala daya upaya untuk **meletakkan** landasan yang kuat agar proses pembangunan tahap berikutnya dapat menjadi terarah dan lancar.

Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang berusaha untuk mengembangkan data dasar dan kemampuan mengelola data untuk memantau kondisi kehidupan penduduk, merancang dan menetapkan sasaran program-program, serta mengukur dampak program dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk. Upaya pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam pengembangan data dasar dan peningkatan pemanfaatan data dimotori oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pandeglang dan Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang.

Pada aspek yang begitu luas sangat sulit untuk menyajikan data statistik yang mampu mengukur tingkat kesejahteraan rakyat secara multi dimensi. Oleh karena itu, statistik atau indikator yang disajikan ini hanya menyangkut segi-segi kesejahteraan yang dapat diukur (*tangible*).

Berbagai kebijakan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang yang utamanya ditujukan untuk kawasan pedesaan diantaranya peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur seperti pembangunan jalan-jalan di pedesaan, pengairan, prasarana pasar, prasarana pendidikan, prasarana Keagamaan dan pusat-pusat pelayanan kesehatan. Tujuan pembangunan tersebut selain untuk pemerataan pembangunan antar wilayah juga untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat pedesaan yang selama ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat perkotaan.

1.1. Maksud dan Tujuan

Tujuan dari penyusunan Publikasi Tinjauan Kondisi Makro Sosial Kabupaten Pandeglang 2018

adalah untuk menjelaskan dan memaparkan berbagai pencapaian indikator sosial dan budaya masyarakat Pandeglang pada tahun 2017. Indikator-indikator tersebut yang diantaranya meliputi masalah kependudukan, kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan dapat dijadikan sebagai gambaran umum hasil pembangunan yang telah dicapai sekaligus menjadi tolak ukur, bahan evaluasi dan acuan bagi pelaksanaan pembangunan yang akan datang.

1.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penyusunan publikasi Tinjauan Kondisi Makro Sosial Kabupaten Pandeglang 2018 ini berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2017 serta beberapa data tambahan dari instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pandeglang.

SUSENAS merupakan kegiatan yang rutin dilakukan BPS sejak tahun 1963. Pada awalnya tujuan dari susenas ini untuk memperoleh keterangan

tentang karakteristik konsumsi, demografis dan ketenakerjaan. Susenas dilaksanakan setiap tahun dengan menyertakan kuesioner Kor (*data pokok*) yang menanyakan karakteristik demografis mengenai semua anggota rumah tangga, dan salah satu dari tiga kuesioner Modul (*data rinci*) secara bergantian. Ketiga Modul tersebut adalah: modul konsumsi dan pendapatan rumah tangga, modul kegiatan sosial budaya dan kesejahteraan rumah tangga, perjalanan dan kriminalitas dan modul kesehatan, pendidikan, perumahan dan lingkungan. Sedangkan indikator yang terdapat dalam kuesioner KOR antara lain:

1. Kesehatan: angka kesakitan, akses pada layanan kesehatan, pemberian ASI, imunisasi dan penolong kelahiran.
2. Pendidikan: tingkat partisipasi sekolah, tingkat pendidikan tertinggi, dan angka melek huruf.
3. Keluarga berencana dan fertilitas: prevalensi kontrasepsi, umur perkawinan pertama, dan angka kelahiran.
4. Perumahan dan sanitasi: luas lantai, jenis atap, jenis dinding, listrik, air bersih dan.

5. Pengeluaran **Rumahtangga**: makanan dan non makanan seminggu, sebulan, dan setahun.

1.3. Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi yang digunakan dalam publikasi ini adalah sebagai berikut.

Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberi petunjuk tentang suatu keadaan/kondisi tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan mengukur perubahan dari waktu ke waktu.

Sex rasio adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Kepadatan penduduk adalah rata-rata jumlah penduduk yang menempati suatu area per kilometer persegi.

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun (angka ini dinyatakan dalam persentase).

Dependency Ratio atau **Angka Beban Ketergantungan** atau **Beban Tanggungan (ABK)** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak

produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun) dikalikan 100.

Angka kesakitan adalah persentase penduduk yang mengalami gangguan/keluhan kesehatan selama sebulan yang lalu yang mengakibatkan aktifitas kesehariannya terganggu.

Angka imunisasi adalah persentase anak usia 0-4 tahun yang mendapatkan imunisasi terhadap penyakit-penyakit tertentu.

Angka partisipasi sekolah adalah tingkat partisipasi sekolah penduduk menurut batas usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan.

Angka buta huruf adalah persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 10 tahun keatas.

Bekerja adalah melakukan kegiatan atau pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama satu minggu dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan/keuntungan.

Angkatan kerja adalah penduduk usia 10 tahun keatas yang bekerja atau mencari pekerjaan.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia 10 tahun keatas.

Angka pengangguran terbuka adalah persentase penduduk yang termasuk angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan.

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah tingkat kematian bayi atau jumlah bayi meninggal per 1000 kelahiran hidup.

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah peluang lama hidup atau umur seseorang pada waktu dilahirkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Publikasi Tinjauan Kondisi Makro Sosial Kabupaten Pandeglang 2018 disusun dalam sepuluh bab penulisan, yaitu:

Bab I Pendahuluan, berisi uraian latar belakang, maksud dan tujuan, sumber data, konsep definisi serta sistematika penulisan.

- Bab II Kependudukan,** menyajikan indikator-indikator kependudukan, diantaranya berisi tentang jumlah penduduk, sex rasio, kepadatan, dan laju pertumbuhan penduduk, serta program Keluarga Berencana (KB).
- Bab III Kesehatan,** menyajikan berbagai indikator kesehatan, diantaranya derajat dan status kesehatan, penolong persalinan dan pemberian air susu ibu (ASI).
- Bab IV Pendidikan,** menyajikan berbagai indikator pendidikan yang meliputi tingkat partisipasi sekolah, tingkat pendidikan yang ditamatkan, angka melek huruf/buta huruf, Sarana dan prasarana/fasilitas Pendidikan.
- Bab V Ketenagakerjaan,** menyajikan data/indikator yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, seperti tingkat partisipasi angkatan kerja, lapangan usaha, status pekerjaan, tingkat pengangguran dan rata-rata jam kerja.
- Bab VI Perumahan,** menyajikan data tentang perumahan dan fasilitasnya seperti jenis

lantai terluas, jenis dinding terluas, atap terluas, sumber air minum, penerangan dan sebagainya.

Bab VII Kemiskinan, menyajikan data tentang kemiskinan.

Bab VIII Pengeluaran, menyajikan data pola konsumsi masyarakat.

Bab IX Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menyajikan tentang Kondisi/Posisi Indeks Pembangunan Manusia dan komponen-komponen penyusunnya yang dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia suatu wilayah.

Bab X Penutup, merupakan kesimpulan secara menyeluruh terhadap pembahasan dari indikator-indikator sosial budaya pada bab-bab sebelumnya.

Penduduk merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan, karena permasalahan kependudukan tidak hanya menyangkut kelahiran, kematian dan migrasi, tetapi juga menyangkut masalah sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan yang sangat berpengaruh dalam upaya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu data kependudukan yang akurat dan tepat sangat dibutuhkan dalam upaya penyelesaian masalah-masalah tersebut.

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat penting, karena disamping sebagai pelaksana pembangunan, penduduk juga merupakan sasaran akhir dari semua perencanaan pembangunan seperti kesejahteraan penduduk, kesehatan penduduk, keamanan penduduk, kualitas sumber daya manusia dan sebagainya. Oleh sebab itu pembangunan bidang kependudukan perlu diarahkan sehingga mempunyai karakteristik yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan. Karakteristik

penduduk menjadi acuan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Begitu juga untuk bahan evaluasi, data mengenai kependudukan dapat dijadikan sebagai dasar untuk menilai sejauh mana keberhasilan dan dampak dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

2.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam penentuan kebijakan bidang kependudukan. Jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang pada tahun 2017 tercatat sebanyak 1.205.203 jiwa. Selama periode 2000-2010 rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) menunjukkan angka sekitar 1,36 persen per tahun, sedangkan pada periode 2010 – 2017 rata-rata laju pertumbuhan penduduk mencapai 0,69 persen.

Berdasarkan data laju pertumbuhan penduduk di atas dimana pada periode 2010-2017 angkanya lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya angka laju

pertumbuhan penduduk ini antara lain karena keberhasilan program keluarga berencana di Kabupaten Pandeglang, pendewasaan usia perkawinan atau banyak penduduk Kabupaten Pandeglang yang migrasi ke Kota/Kabupaten lain.

Meningkatnya jumlah penduduk akan berdampak pada berbagai masalah kependudukan yang sangat serius. Oleh karena itu pembangunan bidang kependudukan harus memperhatikan laju pertumbuhan penduduk dengan berbagai karakteristiknya menjadi sangat penting dan harus dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan dengan program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup penduduk atau kesejahteraan penduduk.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
dan *Sex Ratio* di Kabupaten Pandeglang,
Tahun 1990-2017

Tahun	Penduduk		Total	<i>Sex Ratio</i>
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1990	434.279	424.821	859.100	102,23
2000	518.864	492.924	1.011.788	105,26
2010	589.056	560.554	1.149.610	105,08
2011	599.524	566.599	1.162.123	105,10
2012	604.040	577.390	1.181.430	104,61
2013	604.603	578.403	1.183.006	104,53
2014	607.304	581.101	1.188.405	104,51
2015	610.412	584.499	1.194.911	104,43
2016	613.108	587.404	1.200.512	104,38
2017	615.297	589.906	1.205.203	104,30

Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang

Angka sex ratio penduduk Pandeglang seperti terlihat pada tabel 2.1 dari tahun ke tahun berada pada posisi di atas 100. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Pada tahun 2017 sex ratio sebesar 104,30 yang berarti bahwa setiap 100 orang penduduk perempuan di Pandeglang ada 104 sampai 105 orang penduduk laki-

laki. Hal ini menarik untuk diteliti lebih jauh, fenomena apa yang terjadi di Kabupaten Pandeglang, sehingga terjadi penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan, apakah jumlah kelahiran laki-laki lebih besar dari perempuan, apakah penduduk perempuan yang sekolah dan bekerja di luar Pandeglang lebih banyak dari penduduk laki-laki, apakah tingkat kesehatan penduduk perempuan lebih rendah dari penduduk laki-laki, atau tingkat migrasi keluar penduduk perempuan lebih besar dari penduduk laki-laki, dan masih banyak lagi kemungkinan hal yang terjadi terkait dengan angka sex ratio.

2.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Masalah kependudukan yang tampak terlihat secara kasat mata di Kabupaten Pandeglang adalah sebaran penduduk yang tidak merata. Persebaran penduduk yang tidak merata akan terkait dengan akses penduduk terhadap daya dukung lingkungan baik fisik maupun sosial yang tidak berimbang. Contoh nyata adalah perbedaan persebaran penduduk pada daerah perkotaan (*urban*) dan pedesaan (*rural*). Dampak dari

ketidakseimbangan sebaran penduduk tersebut berakibat pada perbedaan tingkat kemudahan (akses) penduduk terhadap berbagai fasilitas baik fisik maupun sosial antara penduduk perkotaan dengan penduduk di pedesaan.

Motif utama dari fenomena di atas terjadi karena meningkatnya arus perpindahan penduduk dari desa ke kota akibat dari keterbatasan lapangan kerja di desa dan kemudahan mengakses fasilitas sosial di kota dibandingkan di desa sehingga menjadi salah satu tujuan migrasi dan daya tarik penduduk. Dari beberapa literatur hasil penelitian, menyebutkan bahwa mayoritas penduduk yang melakukan migrasi ke kota mempunyai alasan yang sama, yaitu untuk mencari pekerjaan/usaha dan menuntut ilmu dalam rangka membuka jalan mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Dengan luas wilayah sebesar 2.746,89 km² dan jumlah penduduk sebanyak 1.205.203 jiwa, maka pada tahun 2017 setiap km² wilayah di Kabupaten Pandeglang rata-rata ditempati oleh 431 jiwa. Seperti disajikan tabel 2.2, penyebaran penduduk antar

kecamatan di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2017 masih belum merata. Kepadatan penduduk berbeda sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Kecamatan dengan kepadatan penduduk paling besar adalah Kecamatan Labuan yaitu 3.636 jiwa per km², angka ini mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3.622 jiwa per km². Sedangkan kecamatan paling kecil kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Sumur, yaitu 93 jiwa per km². Kecamatan-kecamatan sekitar Ibukota Kabupaten lebih padat dibandingkan kecamatan-kecamatan di wilayah selatan Kabupaten Pandeglang, agar kepadatan penduduk dapat merata di setiap kecamatan, pemerintah Kabupaten Pandeglang harus dapat mengambil kebijakan yang berhubungan dengan pemerataan persebaran penduduk.

Tabel 2.2

Kepadatan Penduduk Pandeglang Menurut Kecamatan Tahun 2017

Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
SUMUR	258,54	93,21	4,00
CIMANGGU	259,73	149,23	3,59
CIBALIUNG	221,88	137,84	4,20
CIBITUNG	180,72	123,94	3,89
CIKEUSIK	322,76	165,19	3,73
CIGEULIS	176,21	201,40	3,85
PANIMBANG	132,84	388,31	4,02
SOBANG	138,88	261,35	3,47
MUNJUL	75,25	306,98	3,75
ANGSANA	64,84	406,26	3,64
SINDANGRESMI	65,20	339,86	3,72
PICUNG	56,74	649,58	4,35
BOJONG	50,72	689,25	4,13
SAKETI	54,13	837,63	4,45
CISATA	32,65	746,28	4,12
PAGELARAN	42,76	828,27	4,10
PATIA	45,48	622,74	3,80
SUKARESMI	57,30	609,98	3,94
LABUAN	15,66	3.636,46	4,63
CARITA	41,87	798,38	4,03
JIPUT	53,04	553,62	4,16
CIKEDAL	26,00	1.224,08	4,22
MENES	22,41	1.640,61	4,50
PULOSARI	31,33	921,96	4,79
MANDALAWANGI	80,19	610,92	4,43
CIMANUK	23,64	1.697,97	4,98
CIPEUCANG	21,16	1.384,40	4,61
BANJAR	30,50	1.021,97	4,58
KADUHEJO	33,57	1.073,10	4,97
MEKARJAYA	31,34	623,45	4,30
PANDEGLANG	16,85	2.565,16	4,75
MAJASARI	19,57	2.517,73	5,14
CADASARI	26,20	1.253,89	4,89
KARANGTANJUNG	19,07	1.804,98	4,85
KORONCONG	17,86	1.048,15	4,96
KAB. PANDEGLANG	2.746,89	430,67	4,25

Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang

Tingginya tingkat kepadatan penduduk akan berpengaruh pada usaha memperbaiki tingkat kesejahteraan, terutama menyangkut pemenuhan kebutuhan perumahan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Pembangunan yang dilaksanakan di daerah-daerah yang tinggi tingkat kepadatannya harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan dapat menciptakan lapangan kerja yang luas bagi penduduk setempat, sehingga tingkat pengganguran penduduk dapat ditekan serendah mungkin untuk menghindari dampak sosial negatif yang mungkin muncul.

2.3. **Struktur Umur**

Pertumbuhan penduduk suatu daerah dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dan besarnya penduduk yang datang. Angka kelahiran yang tinggi akan mengakibatkan komposisi penduduk cenderung pada kelompok usia muda. Keberhasilan pembangunan bidang kependudukan secara umum terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur,

apabila semakin rendah proporsi penduduk tidak produktif, yaitu penduduk muda usia (0-14 tahun) dan penduduk usia lanjut (65 tahun keatas) maka angka beban ketergantungan atau beban tanggungan (*dependency ratio*) semakin rendah. Komposisi penduduk Pandeglang untuk kelompok penduduk usia produktif cukup tinggi, dan apabila diimbangi dengan kualitas yang baik akan menjadi sumber daya penting bagi pembangunan.

Tabel 2.3
Komposisi Penduduk Menurut Umur dan
Jenis Kelamin di Kabupaten Pandeglang,
Tahun 2017

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0 – 4	64.140	62.006	126.146	10,47
5 – 9	67.870	64.032	131.902	10,94
10 – 14	63.510	58.808	122.318	10,15
15 – 19	56.308	46.766	103.074	8,55
20 – 24	43.889	40.905	84.794	7,04
25 – 29	44.001	43.500	87.501	7,26
30 – 34	42.017	41.805	83.822	6,96
35 – 39	43.894	45.030	88.924	7,38
40 – 44	41.934	42.193	84.127	6,98
45 – 49	40.734	38.963	79.697	6,61
50 – 54	33.691	31.151	64.842	5,38
55 – 59	24.564	23.564	48.128	3,99
60 – 64	19.896	18.473	38.369	3,18
65 - 69	12.576	12.521	25.097	2,08
70 – 74	8.297	9.352	17.649	1,46
75 +	7.976	10.837	18.813	1,56
JUMLAH	615.297	589.906	1.205.203	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang

Seperti ditunjukkan pada tabel 2.3, komposisi umur penduduk Pandeglang belum menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dibanding tahun-

tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 Angka Beban Ketergantungan atau Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) sebesar 57,90, dengan kata lain rata-rata dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) harus menanggung sekitar 57 sampai 589 penduduk yang tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas).

Tabel 2.4
Jumlah dan Persentase Penduduk
Menurut Kelompok Umur
di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2017

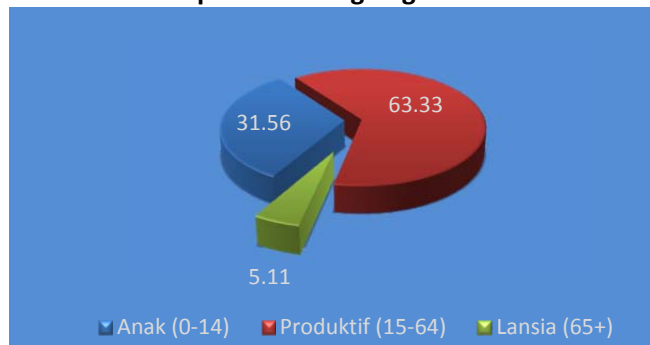
Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Anak (0–14)	195.520	184.846	380.366
Produktif (15–64)	390.928	372.350	763.278
Lansia (65 +)	28.849	32.710	61.559
Jumlah	195.520	184.846	380.366
<i>Dependency Ratio</i>			57,90

Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang

Salah satu dampak dari keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan secara umum diantaranya terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut kelompok umur yang tercermin dengan semakin rendahnya Angka Beban Tanggungan.

Semakin kecil Angka Beban Tanggungan akan memberikan kesempatan pada penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya dan penduduk pada umumnya. Sebaliknya besarnya Angka Beban Tanggungan akan menghambat proses pembangunan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM baik secara individu maupun kolektif. Salah satu upaya yang mungkin dapat dilakukan dalam rangka mengurangi besarnya angka beban **ketergantungan** adalah dengan menekan angka kelahiran (*fertilitas*), dan menghindari usia perkawinan muda.

Grafik 2.1
Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur
di Kabupaten Pandeglang Tahun 2017



Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang

2.4. Keluarga Berencana

Diantara cara/alat kontrasepsi yang ada, ternyata SUNTIK dan PIL merupakan pilihan terbanyak para akseptor KB. Sebanyak 72,15 persen akseptor KB menggunakan alat kontrasepsi SUNTIK dan sebanyak 17,65 persen menggunakan PIL, selebihnya sekitar 10,21 persen akseptor menggunakan alat kontrasepsi IUD, MOP/MOW, IMPLANT dan KONDOM.

Tabel 2.5
Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun
yang Pernah kawin dan Sedang Menggunakan
Alat/Cara KB Menurut Jenis Alat/Cara di
Kabupaten Pandeglang, Tahun 2015-2017

Cara/Alat Kontrasepsi	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Sterilisasi wanita/tubektomi/MOW	0,82	0,88	1,07
Sterilisasi pria/vasektomi/MOP	-	-	-
IUD/AKDR/spiral	4,11	3,22	1,92
Suntikan	67,12	75,81	72,15
Susuk KB/implan	5,60	5,97	6,78
Pil	22,34	13,94	17,65
Lainnya	-	0,18	0,44
TOTAL	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang

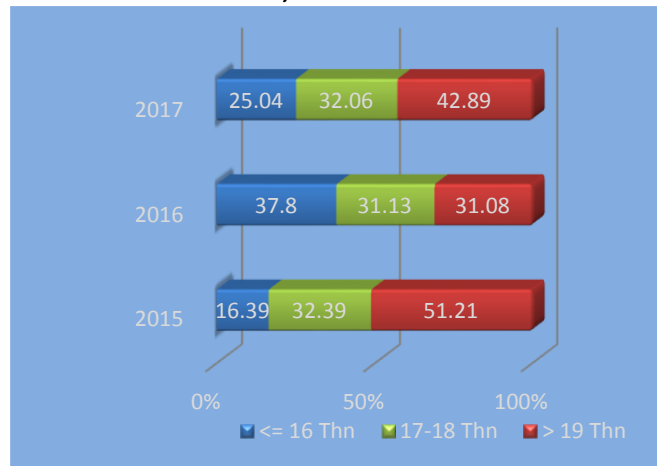
Preferensi PIL nampak semakin bertambah, yang tercermin dari meningkatnya persentase pengguna alat kontrasepsi pil dibanding tahun 2016 sebesar 13,94 persen menjadi 17,65 persen pada tahun 2017. Beberapa motif dari kondisi diatas, kemungkinan sebagian besar akseptor KB lebih memilih cara suntik dan pil dikarenakan harganya relatif murah, mudah diperoleh, praktis dan faktor resikonya relatif lebih kecil dibanding dengan menggunakan alat kontrasepsi lainnya.

Disamping Program Keluarga Berencan (KB), hal lain yang juga mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap tinggi rendahnya tingkat fertilitas adalah faktor usia perkawinan pertama. Ini dikarenakan panjangnya masa reproduksi seorang perempuan berkaitan dengan umur pertama kali perempuan melakukan perkawinan. Semakin muda usia perkawinan pertama seorang perempuan, maka peluang untuk memiliki anak lebih banyak semakin besar karena panjangnya masa reproduksi seorang perempuan yang kawin muda.

Pendewasaan usia kawin merupakan salah satu komponen vital yang turut menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kebahagiaan keluarga termasuk juga kesehatan ibu. Pemerintah Kabupaten Pandeglang harus lebih serius dalam memberikan penyuluhan tentang usia perkawinan pertama, seiring dengan masih besarnya kecenderungan masyarakat Kabupaten Pandeglang yang melangsungkan perkawinan pada usia muda.

Pada tahun 2017 dari jumlah perempuan yang pernah kawin, persentase perempuan yang melangsungkan perkawinan pertamanya pada umur ≤ 16 tahun sebanyak 25,04 persen. Angka ini mengalami penurunan dibanding tahun 2016 yang besarnya 37,80 persen. Angka ini masih sangat tinggi dan sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan.

Grafik 2.2
Distribusi Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia
10 Tahun Ke Atas Menurut Umur Perkawinan
Pertama, Tahun 2015-2017



Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang

Pada grafik 2.2 terlihat bahwa dari tahun ke tahun penduduk perempuan di Kabupaten Pandeglang mengalami fluktuasi pendewasaan usia perkawinan pertama. Pada tahun 2017 persentase usia perkawinan pertama perempuan pandeglang yang melangsungkan perkawinan pada usia 16 tahun kebawah sebesar 25,04 persen, hal ini menunjukkan adanya peningkatan pendewasaan dibanding tahun 2016 yang mencapai 37,80 persen.

Hal tersebut diatas perlu mendapat perhatian serius, mengingat pernikahan pada usia muda cukup beresiko bagi kesehatan perempuan. Dampak lain yang dapat ditimbulkan dari usia perkawinan muda, secara mental umumnya rentan terhadap perceraian karena emosi yang belum stabil. Di samping itu wanita yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, akan menambah panjang masa fertilitas dari seorang ibu, dengan bertambah panjangnya masa fertiltas seorang ibu maka berimplikasi pada tingginya laju pertumbuhan penduduk di suatu daerah karena dengan panjangnya masa fertiltas seorang ibu maka peluang untuk mempunyai anak lebih banyak dibanding dengan perempuan yang masa fertilitasnya lebih pendek.

Pembangunan bidang kesehatan yang digariskan dalam Sistem Kesehatan Nasional diarahkan agar jangkauan pelayanan kesehatan lebih luas dan merata sehingga dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat diharapkan dapat menghasilkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih tinggi sehingga memungkinkan masyarakat hidup lebih produktif, baik secara ekonomi maupun sosial.

Masalah kesehatan merupakan persoalan penduduk selama hidup, oleh karenanya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan sangatlah penting. Bahkan pemerintah telah mengarahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) diprioritaskan ke sektor kesehatan dan pendidikan dasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat antara lain tersedianya sarana kesehatan, keadaan lingkungan yang memadai dan mutu makanan yang dikonsumsi. Penanganan faktor

tersebut harus dilakukan terarah dan terpadu dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi yang terkait.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk adalah Jumlah Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup. Selain itu aspek penting lainnya yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah Status Kesehatan antara lain diukur melalui Angka Kesakitan atau Tingkat Keluhan Kesehatan.

3.1. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Indikator Jumlah Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup merupakan indikator utama yang menunjukkan derajat kesehatan penduduk. Pada tahun 2017 Jumlah Kematian Bayi 0-12 bulan di Kabupaten Pandeglang menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 254 menjadi 214 di tahun 2017. Angka Harapan Hidup Kabupaten Pandeglang pada tahun 2017 relatif meningkat dari 63,77 tahun (tahun 2016) menjadi 64,04 tahun (tahun 2017). Angka ini memberi makna bahwa setiap bayi di kabupaten

Pandeglang yang lahir pada tahun 2017 mempunyai harapan untuk hidup selama 64,04 tahun.

Tabel 3.1
Jumlah Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup
Penduduk Kabupaten Pandeglang,
Tahun 2015-2017

Indikator Derajat Kesehatan	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Kematian Bayi *)	327	254	214
Angka Harapan Hidup (tahun) **)	63,51	63,77	64,04

Sumber : *) Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang

**) Penghitungan Metode Baru Susenas Tahun 2014-2017

Gambaran mengenai status kesehatan penduduk biasanya dapat dilihat melalui indikator Angka Kesakitan, yaitu persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan atau keluhan kesehatan sehingga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Dari table 3.2 pada tahun 2017 sebanyak 16,57 persen penduduk mengalami keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggu aktivitasnya. Bila dibedakan berdasarkan gender, angka kesakitan penduduk laki-laki yaitu 14,77

persen lebih kecil dari pada penduduk perempuan yang sebesar 18,45 persen.

Tabel 3.2
Angka Kesakitan dan Rata-rata Lamanya Sakit
Penduduk Kabupaten Pandeglang,
Tahun 2017

Indikator Kesehatan	Jenis Kelamin		
	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Kesakitan (%)	14,77	18,45	16,57
Rata-rata Lamanya Sakit (hari)	7,70	6,67	7,14

Sumber : Susenas Tahun 2017

Keterangan :

L = Laki- laki, P = Perempuan

Rata-rata jumlah hari sakit atau terganggu aktivitas sehari-harinya pada tahun 2017 sebesar 7,14 hari. Rata-rata lamanya sakit penduduk laki-laki relatif lebih lama dibandingkan penduduk perempuan. Rata-rata lamanya sakit penduduk perempuan 6,67 hari dan penduduk laki-laki 7,70 hari.

3.2. Pemberian ASI, Imunisasi dan Gizi Balita

Air Susu Ibu (ASI) merupakan nutrisi yang paling penting bagi pertumbuhan dan kesehatan bayi karena selain mengandung nilai gizi yang cukup tinggi juga mengandung zat pembentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit, untuk itu perlu adanya peningkatan kesadaran penduduk khususnya kaum ibu akan pentingnya ASI bagi seorang bayi yang tidak bisa digantikan dengan susu formula apapun. Selain pemenuhan ASI dan cakupan imunisasi, bayi diharapkan memperoleh asupan gizi yang cukup. Sejak tahun 2000 di dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda), pemerintah mencanangkan program perbaikan gizi yang salah satunya adalah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan gizi untuk mencapai status gizi yang baik dengan menurunkan prevalensi gizi kurang dan gizi lebih. Sasaran yang akan dicapai adalah menurunkan prevalensi gizi kurang pada balita menjadi 20 persen.

Tabel 3.3
Persentase Penduduk Umur 0-23 Bulan (Baduta) yang
Pernah Diberi ASI dan Rata-rata Lama Pemberian ASI
(Bulan) di Kabupaten Pandeglang,
Tahun 2016-2017

Indikator Kesehatan	2016			2017		
	L	P	Total	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Baduta Pernah diberi ASI (%)	97,50	99,02	98,35	98,85	95,87	97,57
Rata-rata lamanya diberi ASI (bulan)	11,05	9,03	9,92	10,60	9,41	10,10

Sumber : Susenas Tahun 2016 – 2017

Pada tahun 2017, penduduk umur 0-23 bulan (baduta) di Kabupaten Pandeglang yang pernah mendapatkan ASI dari orangtuanya cukup besar yaitu 97,57 persen, dengan rata-rata lamanya disusui selama 10,10 bulan atau 10 bulan 3 hari mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2016 rata-rata lama disusui selama 9,92

bulan atau 9 bulan 28 hari. Kondisi ini cukup menggembirakan dan harus lebih di tingkatkan. Dengan tingginya jumlah balita yang mendapatkan ASI sehingga memungkinkan balita-balita di Pandeglang dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat dan berkualitas. Rata-rata balita di Pandeglang mendapatkan ASI cukup lama yaitu lebih dari satu tahun walaupun masih kurang dari yang semestinya (2 tahun).

Banyaknya balita yang mendapatkan imunisasi di Kabupaten Pandeglang cukup tinggi dengan beragam imunisasi yang diberikan seperti imunisasi BCG, Polio dan sebagainya seperti dalam tabel 3.4. Bagi balita imunisasi sangat penting untuk menjaga dan memberikan kekebalan tubuh dari serangan berbagai jenis penyakit. Dengan tingginya persentase balita yang mendapatkan imunisasi diharapkan status kesehatan balita di Pandeglang lebih baik sehingga balita Pandeglang dapat berkembang terus menjadi anak yang lebih sehat dan lebih kuat.

Tabel 3.4
Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang
Pernah mendapat Imunisasi menurut Jenis Kelamin
Di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2017

Imunisasi	Jenis Kelamin		
	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
BCG	84,26	84,88	84,57
DPT	74,67	81,19	77,88
Polio	84,99	89,89	87,40
Campak/Morbili	61,68	62,21	61,94
Hepatitis B	67,65	75,08	71,31

Sumber : Susenas Tahun 2017

Gambaran umum dari kondisi kesehatan balita secara nyata dapat dilihat dari keadaan Status Gizi Balita yang dikategorikan berdasarkan Gizi Lebih, Gizi Baik, Gizi Kurang, dan Gizi Buruk.

Tabel 3.5
Jumlah dan Persentase Balita Menurut Status Gizi
Di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2015-2017

Status Gizi	2015		2016		2017	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Gizi Lebih	1.119	1,56	2.842	3,02	1.391	1,71
Gizi Baik	68.202	89,32	82.116	87,24	72.905	89,54
Gizi Kurang	5.758	7,54	7.178	7,63	6.118	7,51
Gizi Buruk	1.017	1,33	200	0,21	1.011	1,24
Jumlah	76.096	100,00	92.336	100,00	81.425	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pandeglang

Seperti disajikan pada tabel 3.5, balita dengan status Gizi Buruk di Kabupaten Pandeglang tahun 2017 sebanyak 1.011 atau 1,24 persen dari jumlah balita. Sedangkan yang berstatus Gizi Baik sebanyak 72.905 balita atau 89,54 persen. Bila dibandingkan tahun 2016, balita dengan status gizi baik **relative** menurun. Hal ini menunjukkan bahwa perlu usaha yang lebih baik lagi untuk meningkatkan status gizi balita di Kabupaten Pandeglang.

3.3. Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Salah satu faktor yang mempunyai andil cukup besar dan merupakan faktor penentu utama dalam upaya meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk adalah ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan. Keberadaan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di lapangan merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan karena relatif lebih mudah dijangkau oleh penduduk di pelosok desa.

Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (*Pustu*) di Pandeglang pada tahun 2017 sebanyak 94 unit yang tersebar di 35 Kecamatan. Ini berarti, untuk penanganan masalah kesehatan penduduk pada setiap Kecamatan rata-rata dilayani oleh 2 – 3 puskesmas/pustu. Hal lain yang tidak kalah penting dalam penanganan kesehatan adalah ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan reproduksi yang bertujuan untuk mengupayakan agar persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya).

Tabel 3.6
Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang
Pernah Melahirkan menurut Penolong Persalinan
di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2016-2017

Penolong Persalinan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Tenaga Kesehatan :	76,23	100,00
- Dokter	6,17	11,00
- Bidan	70,06	67,59
- Tenaga Medis Lainnya	-	21,40
Bukan Tenaga Kesehatan :	23,78	-
- Dukun	23,78	-
- Lainnya	-	-
Total	100,00	100,00

Sumber : Susenas Tahun 2016 dan 2017

Secara umum, persalinan yang dibantu oleh dokter, bidan ataupun tenaga medis lainnya lebih aman dibandingkan dengan persalinan yang dibantu oleh tenaga non medis. Hal ini menunjukkan bahwa peran penolong persalinan/kelahiran sangat penting bagi keselamatan bayi dan ibu yang melahirkan serta berkaitan erat dengan usaha penurunan angka kematian bayi dan ibu pada saat melahirkan.

Pada tahun 2017 persentase penolong persalinan oleh tenaga kesehatan meningkat menjadi 100,00 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 76,23 persen. Bila dilihat secara rinci persentase penolong persalinan oleh tenaga kesehatan, 67,59 persen lebih dilakukan oleh bidan sedangkan yang ditolong oleh dokter hanya sekitar 11,00 persen. Jika dilihat dari tabel 3.5, persentase persalinan oleh dokter meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 76,23 persen pada tahun 2016.

Tabel 3.7
Persentase Penduduk Menurut
Alasan Utama Tidak Berobat Jalan
di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2016-2017

Jenis Pengobatan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Tidak punya biaya berobat	10,48	10,52
Mengobati sendiri	63,57	72,92
Merasa tidak perlu	23,18	14,17
Lainnya	2,77	2,39
Total	100,00	100,00

Sumber : Susenas Tahun 2016 dan 2017

Pada umumnya penduduk yang mengalami gangguan/keluhan kesehatan berusaha melakukan upaya pengobatan baik dengan berobat sendiri maupun berobat jalan. Pada tahun 2017 penduduk yang tidak punya biaya berobat sebesar 10,52 persen. Sedangkan penduduk yang mengobati sendiri sebesar 72,92 persen dan penduduk yang merasa tidak perlu berobat sebesar 14,17 persen.

Untuk berobat jalan ketika penduduk mengalami sakit atau gangguan kesehatan, praktek dokter merupakan rujukan utama bagi penduduk. Kecenderungan penduduk yang sakit untuk berobat jalan ke tempat pelayanan kesehatan terlihat meningkat. Seperti disajikan pada tabel 3.8, terlihat bahwa jenis fasilitas kesehatan yang sering digunakan dan menjadi alternatif pilihan penduduk adalah puskesmas/pustu.

Pada tahun 2017 penduduk yang melakukan kunjungan berobat jalan ke fasilitas kesehatan lainnya (petugas kesehatan dan pengobatan tradisional/alternatif) menurun dari 6,88 persen pada tahun 2016 menjadi 4,77 persen. Hal ini menunjukkan

bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan lain cenderung menurun dan beralih ke puskesmas/pustu. Meningkatnya persentase kunjungan penduduk yang berobat jalan ke puskesmas/pustu mungkin karena biaya yang dikeluarkan relatif murah.

Tabel 3.8
Persentase Penduduk yang Berobat Jalan
Menurut Tempat Berobat
di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2016-2017

Tempat Berobat	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Rumah Sakit	4,04	4,48
Praktek Dokter	56,76	50,80
Puskesmas (termasuk Pustu)	32,32	39,95
Lainnya	6,88	4,77
Penderita Sakit yang Berobat Jalan	66,99	42,75

Sumber : Susenas Tahun 2016 dan 2017

Fasilitas kesehatan yang dikunjungi penduduk untuk berobat jalan yang meningkat cukup signifikan adalah puskesmas/pustu, yaitu dari 32,32 persen pada tahun 2016 menjadi 39,95 persen pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan rujukan berobat yang meningkat yang

digunakan oleh masyarakat pandeglang dengan memilih puskesmas/pustu sebagai tempat berobat dibandingkan lainnya. Penurunan pelayanan praktek dokter di pandeglang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan fasilitas ini mengalami penurunan. Pada tahun 2016 masyarakat yang berobat ke praktek dokter sebesar 56,76 persen dan pada tahun 2017 menjadi hanya 50,80 persen.

Tingginya kesadaran masyarakat untuk berobat ke fasilitas kesehatan perlu diimbangi dengan upaya peningkatan faktor-faktor penunjang kesehatan lainnya, untuk itu upaya peningkatan sarana dan prasarana seperti kelengkapan peralatan medis, tenaga kesehatan baik jumlah maupun kualitasnya, merupakan hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di daerah-daerah pedesaan.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional maupun regional. Pembangunan bidang pendidikan akan meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada pada suatu wilayah yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing masyarakat/penduduk dalam memasuki dunia kerja. Dengan pendidikan pula, pemerintah akan lebih mudah dalam mentransfer tujuan pembangunan kepada masyarakat karena tingkat pemahaman masyarakat akan lebih baik kalau pendidikan juga lebih baik.

Upaya melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan yang terarah dan tepat sasaran telah ditentukan melalui visi pendidikan nasional yaitu *“terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berakhlak, berkeahlian, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di dukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, betaqwa,*

berakhlak mulia, cinta tanah air berdasarkan hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin”.

4.1. Tingkat Pendidikan

Tolak ukur yang sangat mendasar di bidang pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis (Angka Melek Huruf) penduduk dewasa. Kemampuan membaca dan menulis dibedakan terhadap huruf latin, huruf lainnya, dan tidak dapat membaca dan menulis. Dalam tulisan ini yang dimaksud buta huruf adalah penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin. Dengan memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin akan menjadikan seseorang lebih mudah memahami dan menyerap berbagai informasi baik dari media cetak maupun elektronik sehingga akan menambah pengetahuan bagi dirinya.

Kemampuan baca tulis tercermin dari indikator Angka Melek Huruf. Penduduk berusia 15 tahun ke atas di Pandeglang yang sudah mampu membaca dan menulis huruf latin tahun 2017 mencapai 95,43 persen,

sisanya sebanyak 4,57 persen adalah penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf). Penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis sebagian besar terkonsentrasi pada penduduk usia tua, yaitu penduduk yang berumur 45 tahun ke atas.

Tabel 4.1
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut
kemampuan Membaca dan Menulis dan
Jenis Kelamin Di Kabupaten Pandeglang,
Tahun 2015-2017

Jenis Kelamin	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	97,74	98,31	97,56
Perempuan	93,37	94,73	93,22
Laki-laki + Perempuan	95,57	96,55	95,43

Sumber : Susenas Tahun 2015 - 2017

Bila dibandingkan antara penduduk laki-laki dan perempuan, maka penduduk laki-laki lebih banyak yang sudah mampu membaca dan menulis, seperti terlihat pada tabel 4.1 yaitu pada tahun 2017 untuk penduduk laki-laki sebesar 97,56 persen, sedangkan untuk perempuan sebesar 93,22 persen.

Indikator lain untuk melihat tingkat pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah menunjukkan berapa lama penduduk Pandeglang mampu menyekolahkan anaknya. Rata-rata lama sekolah penduduk Pandeglang tahun 2017 baru mencapai 6,63 tahun, ini berarti rata-rata pendidikan penduduk Pandeglang baru sampai jenjang SLTP kelas satu. Jadi secara umum tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk Pandeglang baru lulus SD dan sedikit yang melanjutkan ke jenjang SLTP.

Dalam rangka meningkatkan program wajar dikdas 9 tahun kiranya masih banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang khususnya bagi Dinas/Instansi terkait. Program ini dikatakan berhasil apabila Angka Partisipasi Sekolah anak usia 7-15 tahun mencapai 100 persen, dengan kata lain seluruh anak usia SD dan SLTP dalam keadaan bersekolah. Melihat perkembangan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencapai rata-rata lama sekolah 9 tahun akan memerlukan waktu yang cukup panjang. Kiranya dibutuhkan program-program untuk mempermudah akses masyarakat ke sarana pendidikan

setingkat SLTP. Selain itu perlu juga menyadarkan masyarakat agar termotivasi untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 4.2
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk
Kabupaten Pandeglang, Tahun 2015-2017

Tahun	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)
2015	6,60
2016	6,62
2017	6,63

Sumber : Susenas Tahun 2015 - 2017

Selain indikator Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah, gambaran kualitas SDM Pandeglang dapat dilihat juga dari pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk itu sendiri. Pendidikan yang ditamatkan penduduk berumur 15 tahun keatas di Pandeglang tahun 2017 paling banyak adalah masih tingkat SD sederajat yaitu sebesar 39,92 persen, sedangkan SLTP hanya 21,55 persen. Yang sangat mengkhawatirkan adalah pada tahun 2017 masih ada penduduk yang

tidak/belum tamat SD sederajat yaitu mencapai 21,75 persen, dimana pada kelompok ini masih terindikasi adanya penduduk diluar usia wajar dikdas (usia dewasa/tua).

Tabel 4.3
Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2017

Tingkat Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Tamat SD/MI/Sederajat	17,95	25,69	21,75
SD/MI/Sederajat	40,66	39,16	39,92
SLTP/Sederajat	22,34	20,74	21,55
SLTA/SMK/Sederajat	15,16	10,14	12,70
Universitas	3,89	4,27	4,08
J U M L A H	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas Tahun 2017

Bila melihat komposisi pendidikan yang ditamatkan berdasarkan gender, maka terlihat penduduk laki-laki lebih baik dibandingkan penduduk perempuan. Hal ini terlihat dari penduduk perempuan yang belum atau tidak lulus SLTP serta yang belum

pernah sekolah lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Kondisi ini dimungkinkan karena adanya faktor budaya pada sebagian masyarakat yang lebih mementingkan pendidikan untuk anak laki-laki dibandingkan anak perempuan.

4.2. Tingkat Partisipasi Sekolah

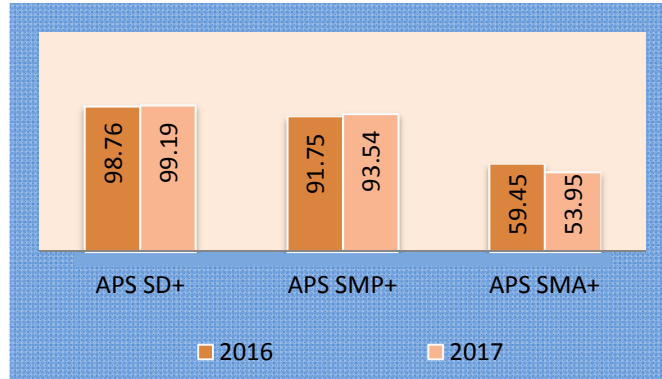
Partisipasi sekolah anak di Pandeglang dapat terlihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia SD/Sederajat, SLTP/Sederajat maupun SLTA/Sederajat. Angka ini menunjukkan partisipasi anak pada usia sekolah yang bersekolah, baik pada usia SD (7-12 tahun), SLTP (13-15 tahun) maupun SLTA (16-18 tahun). Angka ini juga menunjukkan berapa besar keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan program pendidikan yang ada.

APS Kabupaten Pandeglang untuk anak usia SD sebesar 99,19 persen. Ini menunjukkan bahwa dari sekian banyak anak usia SD yaitu 7 sampai 12 tahun yang bersekolah mencapai 99,19 persen, sisanya sebesar 0,81 persen dari anak usia SD tersebut tidak bersekolah baik yang putus sekolah maupun yang

belum pernah sekolah. Partisipasi sekolah anak usia SD perempuan relatif lebih baik dibandingkan dengan partisipasi anak usia SD laki-laki yaitu masing-masing 99,99 persen dan 98,46 persen.

Bila dibandingkan dengan partisipasi sekolah anak usia SD, partisipasi sekolah anak usia SLTP dan SLTA jauh lebih rendah, salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi yang mengakibatkan kurangnya kemampuan masyarakat Pandeglang untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. APS SLTP tahun 2017 sebesar 93,54 persen dan APS SLTA sebesar 53,95 persen. Ini menunjukkan bahwa dari 100 anak usia SLTP (usia 13-15), yang bersekolah hanya 93 anak, atau dari 100 anak usia SLTP ada sekitar 7 anak yang tidak bersekolah dengan berbagai alasan yang ada di masyarakat. Sedangkan untuk anak usia SLTA menunjukkan bahwa dari 100 anak usia SLTA (usia 16-18) hanya 53 anak yang sedang duduk di bangku sekolah.

Gambar 4.1
Angka Partisipasi Sekolah
Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2016-2017



Sumber : Susenas Tahun 2016 - 2017

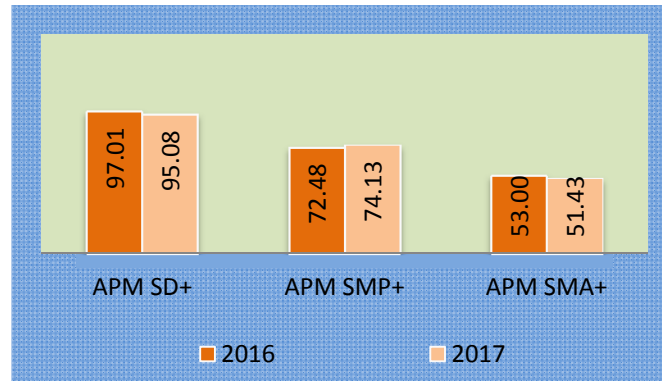
Bila dibandingkan berdasarkan gender, partisipasi sekolah anak usia SLTP (13-15 tahun) perempuan lebih baik dibandingkan anak laki-laki. Sedangkan untuk anak usia SLTA (16-18 tahun) partisipasi sekolah anak perempuan lebih kecil dibandingkan anak laki-laki.

Selain APS, biasanya untuk melihat partisipasi anak/masyarakat terhadap sekolah digunakan juga Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka Partisipasi Murni merupakan

persentase penduduk usia sekolah tertentu yang bersekolah pada jenjang sekolah tersebut terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang dimaksud. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar merupakan Persentase penduduk yang sekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia pendidikan tertentu.

Pada gambar 4.2 terlihat bahwa pada tahun 2017, partisipasi murni (APM) anak usia SD/MI/Sederajat tercatat sebesar 95,08, APM SLTP/Sederajat tercatat sebesar 74,13 sedangkan APM SLTA/Sederajat tercatat sebesar 51,43. Ini menunjukkan bahwa dari 100 anak usia SD/MI/Sederajat, ada 95 anak yang bersekolah dan anak yang bersekolah tepat pada jenjang pendidikan SD/MI/. Begitu juga halnya dengan partisipasi murni anak usia SLTP dan SLTA.

Gambar 4.2
Angka Partisipasi Murni
Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2016-2017

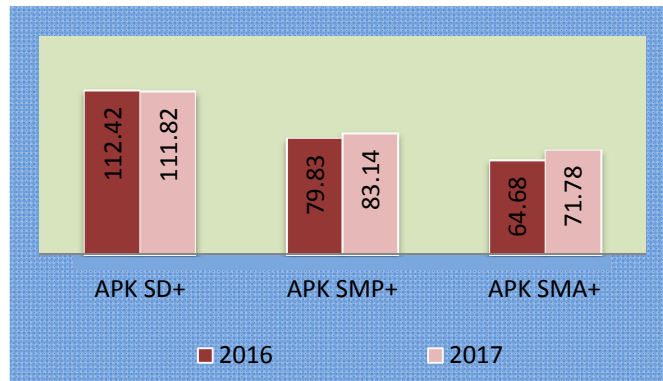


Sumber : Susenas Tahun 2016-2017

Angka Partisipasi Kasar jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat tercatat sudah melampaui angka 100, yaitu mencapai angka 111,82. Hal ini menunjukkan program wajar dikdas 6 tahun sudah tercapai di kabupaten Pandeglang. Angka ini juga menunjukkan bahwa murid SD/MI/Sederajat yang bersekolah di Pandeglang cukup banyak yang usianya tidak tepat 7-12 tahun. Ini terjadi karena adanya anak yang terlambat sekolah sehingga usia di atas 12 tahun masih duduk di bangku SD/MI/Sederajat. Selain itu, ada juga

anak yang terlalu cepat disekolahkan oleh orangtuanya sehingga usia 5 atau 6 tahun sudah disekolahkan pada jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan APK SLTP dan SLTA pada tahun 2017 tercatat masing-masing sebesar 83,14 dan 71,78.

Gambar 4.3
Angka Partisipasi Kotor
Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2016-2017



Sumber : Susenas Tahun 2016-2017

Bila dibandingkan ketiga indikator partisipasi sekolah baik APS, APM maupun APK pada jenjang pendidikan SD, SLTP maupun SLTA dapat terlihat perbandingan antara anak yang bersekolah tepat pada usia sekolah atau anak yang sekolah tidak tepat pada

usia sekolahnya. Untuk anak usia SD, APK lebih besar dibandingkan APS, ini menunjukkan bahwa anak yang usianya bukan usia SD tapi bersekolah di jenjang pendidikan SD/Sederajat lebih banyak dibandingkan anak usia SD yang bersekolah bukan di SD. Sedangkan anak usia SLTP dan SLTA juga sama.

4.3. Fasilitas Pendidikan

Apabila berbicara tentang program pendidikan, hal yang paling penting adalah fasilitas pendidikan itu sendiri. Fasilitas pendidikan khususnya sarana berupa gedung merupakan hal yang penting karena merupakan tempat di mana terjadinya proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Selain itu ketersediaan tenaga pengajar yang memenuhi kualifikasi dan berkualitas merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mutu pendidikan suatu wilayah.

Jumlah Sarana Sekolah, Guru dan Siswa tahun ajaran 2016/2017 dapat dilihat pada tabel 4.4. Tahun ajaran 2016/2017 rata-rata sekolah tingkat SD menampung 156,97 siswa dengan jumlah murid per guru rata-rata 16,34 orang dan sekolah Tingkat SLTP

rata-rata menampung 181,59 siswa dengan jumlah murid rata-rata 16,46 orang per guru. Sedangkan untuk sekolah tingkat SLTA rata-rata menampung 252,55 siswa dengan rata-rata banyaknya murid per guru 15,76 orang.

Tabel 4.4
Jumlah Sekolah, Guru, Murid dan
Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Sekolah
di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2017

Jenjang Sekolah	Jumlah Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD sederajat	1.033	9.926	162.150	16,34	156,97
SLTP sederajat	343	3.783	62.284	16,46	181,59
SLTA sederajat	208	3.334	52.530	15,76	252,55

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Pendidikan kab. Pandeglang 2017

Dengan melihat rasio murid guru, keadaan ini dinilai sudah cukup baik bahkan jumlah guru untuk mengawasi murid cenderung berlebih. Pada tahun ajaran 2016/2017 satu orang guru SD/MI mengajar

atau mengawasi 16 sampai 17 orang siswa, satu orang guru SLTP mengajar atau mengawasi 16 sampai 17 orang siswa. Sedangkan satu orang guru SLTA mengajar atau mengawasi 15 sampai 16 orang siswa.

Bila dikaitkan dengan indikator pendidikan lainnya, terlihat ada hal yang cukup kontradiktif. Jumlah sekolah dan ketersediaan tenaga pengajar cukup banyak, namun partisipasi masyarakat terhadap sekolah tingkat SLTP dan SLTA masih cenderung rendah. Ini mungkin menunjukkan bahwa program dari pemerintah sudah siap untuk melayani masyarakat dalam bidang pendidikan, namun respon masyarakat masih perlu ditingkatkan lagi sehingga termotivasi untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang SLTP dan SLTA, sedangkan untuk tingkat SD sudah cukup baik.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian dari kondisi di atas adalah apakah ketersediaan sarana dan prasarana tersebut tingkat sebarannya sudah merata atau justru terkonsentrasi pada segmen-segmen tertentu, sehingga sebagian masyarakat pada wilayah-wilayah tertentu aksesnya masih sulit.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya memenuhi perekonomian **rumah tangga** dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Bagi masyarakat, pekerjaan merupakan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, kesejahteraan masyarakat suatu wilayah akan terkait dengan masalah ketenagakerjaan. Semakin banyak penduduk yang terlibat dalam kegiatan bekerja dan berpendapatan, diharapkan kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik.

Bekerja diartikan sebagai kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha

berupa sewa atau keuntungan, baik berupa uang atau barang termasuk bagi pengusaha.

Di Indonesia, sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan, batas usia yang diperbolehkan untuk bekerja adalah 15 tahun atau lebih. Untuk melihat kondisi ketenagakerjaan disuatu wilayah perlu dilihat karakteristik ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Karakteristik tersebut berupa indikator ketenagakerjaan antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (**TPAK**), Tingkat Kesempatan Kerja (**TKK**) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (**TPT**).

Indikator ketenagakerjaan di atas merupakan gambaran kegiatan penduduk yang termasuk Penduduk Usia Kerja (**PUK**) dalam hal keterlibatannya pada kegiatan bekerja. Di mana Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Berdasarkan kegiatannya dalam kaitan ketenagakerjaan, Penduduk Usia Kerja ini dikelompokkan menjadi Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

Kegiatan dari penduduk usia kerja yang masuk dalam kelompok angkatan kerja adalah bekerja dan

mencari pekerjaan. Kelompok angkatan kerja ini merupakan kelompok penduduk yang perlu diperhatikan perkembangannya untuk melihat kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Sedangkan kegiatan dari kelompok bukan angkatan kerja adalah sekolah, mengurus **rumah tangga** dan lainnya. Kelompok ini merupakan penduduk usia kerja yang tidak terlibat dalam hal ketenagakerjaan.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2017, penduduk Kabupaten Pandeglang yang masuk kategori usia kerja sebanyak 825.662 jiwa. Angka ini meningkat 1,64 persen dibanding Penduduk Usia Kerja pada tahun **2015**. Meningkatnya jumlah penduduk usia kerja akan mempengaruhi karakteristik ketenagakerjaan di Kabupaten Pandeglang.

5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Partisipasi penduduk usia kerja dalam bekerja dan mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan **rumah tangganya** dapat dilihat melalui angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (**TPAK**). TPAK

adalah proporsi penduduk usia kerja yang termasuk ke dalam angkatan kerja mencakup mereka yang bekerja dan mencari pekerjaan terhadap jumlah penduduk usia kerja. Dari hasil Sakernas tahun 2017, terlihat bahwa partisipasi penduduk usia kerja Kabupaten Pandeglang dalam bekerja dan mencari pekerjaan sebesar 60,68 persen. Bila dibandingkan **dua tahun sebelumnya**, angka ini mengalami peningkatan dari 60,44 persen tahun 2015 menjadi 60,88 persen pada tahun 2017.

Kondisi ini masih terlihat memprihatinkan, karena hanya 60,88 persen dari penduduk usia kerja yang bisa diandalkan untuk mendapatkan penghasilan, itupun di antaranya masih dalam kategori mencari pekerjaan. Oleh sebab itu, harapan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan yang cukup baik bagi masyarakat secara umum agak sulit bila penduduk yang diharapkan mampu memberi masukan pendapatan dalam keluarga atau masyarakat jumlahnya hanya setengah dari penduduk usia kerja.

Tabel 5.1
Indikator Ketenagakerjaan Penduduk
Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 dan 2017

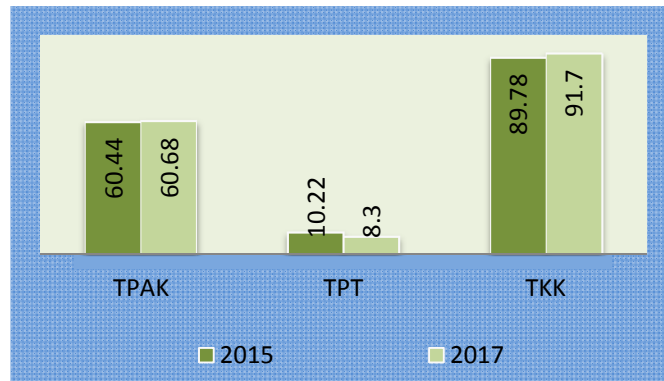
Karakteristik	2015	2017
(1)	(2)	(3)
1. Penduduk Usia Kerja (PUK)	812.368	825.662
2. Angkatan Kerja (AK) :	491.031	501.045
a. Bekerja	440.839	459.456
b. Pengangguran	50.192	41.589
3. Bukan Angkatan Kerja :	321.337	324.617
a. Sekolah dan Mengurus RT	254.679	285.032
b. Lainnya	66.658	39.585
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	60,44	60,68
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	10,22	8,30
6. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	89,78	91,70

Sumber : Sakernas Tahun 2014-2015

Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mengkaji mengapa penduduk usia kerja lainnya yang tidak masuk dalam angkatan kerja. Apakah faktor

ketersediaan lapangan kerja yang terbatas? Ataukah keengganan masyarakat sendiri yang tidak mau masuk dalam angkatan kerja? Ataukah sebagian dari mereka lebih senang bersekolah dibandingkan bekerja? Atau mengapa mereka tidak mau bekerja atau mencari kerja sehingga tidak masuk dalam angkatan kerja.

Gambar 5.1
Indikator Ketenagakerjaan Penduduk Kabupaten
Pandeglang
Tahun 2015 dan 2017



Sumber : Sakernas Tahun 2015 dan 2017

Bila dibedakan berdasarkan jenis kelamin, ada perbedaan angka yang cukup jauh antara TPAK laki-laki dengan perempuan. TPAK laki-laki sebesar 82,40

persen sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 38,17 persen. Perbedaan ini menunjukkan bahwa partisipasi laki-laki jauh lebih besar dibandingkan perempuan dalam upaya mendapatkan penghasilan/pendapatan baik untuk dirinya maupun untuk rumahtangganya.

Dalam hal penyerapan tenaga kerja, pada tahun 2017 cukup tinggi dengan angka **Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)** sebesar 91,70 persen, angka ini meningkat bila dibandingkan dengan TKK tahun 2015 yang sebesar 89,78 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi yang ada di Kabupaten Pandeglang mampu menyerap 91,70 persen dari tenaga kerja yang ada di Kabupaten Pandeglang.

Tabel 5.2
Indikator Ketenagakerjaan Penduduk
Kabupaten Pandeglang Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2017

Karakteristik	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
1. Penduduk Usia Kerja (PUK)	420.273	405.389
2. Angkatan Kerja (AK) :	346.304	154.741
a. Bekerja	317.687	141.769
b. Pengangguran	28.617	12.972
3. Bukan Angkatan Kerja :	73.969	250.648
a. Sekolah dan Mengurus RT	48.853	236.179
b. Lainnya	25.116	14.469
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	82,40	38,17
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,26	8,38
6. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	91,74	91,62

Sumber : Sakernas Tahun 2017

Berdasarkan jenis kelamin TKK laki-laki lebih besar dari TKK perempuan yaitu 91,74 persen berbanding 91,62 persen. Ini menunjukkan bahwa

tenaga kerja laki-laki yang berhasil masuk dalam dunia kerja lebih besar dibandingkan tenaga kerja perempuan yang berhasil masuk dalam dunia kerja.

Seiring dengan menurunnya Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 10,22 persen pada tahun 2015 menjadi 8,30 persen pada tahun 2017. Pengangguran pada penduduk laki-laki ternyata lebih kecil yaitu 8,26 persen dibandingkan pengangguran penduduk perempuan sebesar 8,38 persen. Masalah pengangguran merupakan masalah yang cukup penting untuk segera ditangani, karena pengangguran tidak hanya terkait dengan masalah ekonomi tapi juga dengan masalah sosial lainnya. Meningkatnya angka pengangguran ini harus menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah untuk segera dicarikan solusinya.

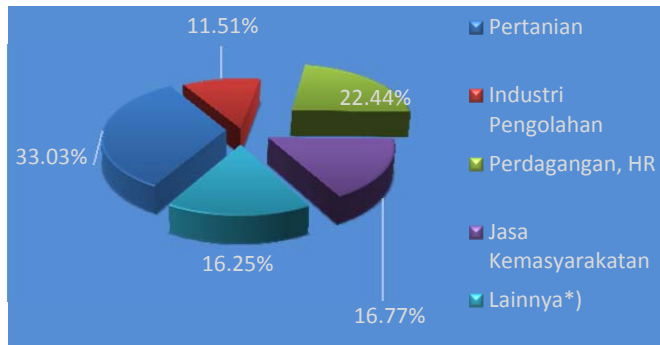
5.2. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Dalam analisis ekonomi, untuk mengetahui sektor apa yang paling dominan di suatu wilayah biasanya dilihat dari sumbangan sektor tersebut dalam

pembentukan PDRB. Namun, sumbangan sektor terhadap PDRB ini hanya melihat dari sisi nilai tambah yang didapat dari kegiatan ekonomi, sedangkan sumbangan suatu sektor terhadap penyerapan tenaga kerja belum bisa terlihat dari angka ini. Oleh sebab itu kedua sumbangan sektor di atas yaitu dari sisi nilai tambah dan tenaga kerja perlu disandingkan untuk keperluan analisis.

Berdasarkan hasil sakernas tahun 2017, kegiatan ekonomi yang paling besar dalam menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian diikuti sektor perdagangan. Masing-masing menyerap tenaga kerja sebesar 33,03 persen dan 22,44 persen.

Gambar 5.2
Komposisi Penduduk Yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017



Sumber : Sakernas Tahun 2017

*) Lainnya: sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor LGA, sektor Konstruksi, sektor Angkutan/Transportasi serta sektor keuangan dan jasa perusahaan

Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah posisi sektor pertanian dan perdagangan yang mendominasi penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di Kabupaten Pandeglang didominasi oleh kedua sektor tersebut. Hal ini juga menegaskan bahwa Kabupaten Pandeglang merupakan wilayah pemerintahan dengan tipe daerah yang agraris yaitu sektor pertanian menjadi basis utama masyarakatnya. Sedangkan sektor perdagangan

merupakan sektor penunjang dari sektor-sektor lain terutama sektor pertanian sehingga sektor perdagangan mempunyai sumbangan terhadap penyerapan tenaga kerja dan nilai PDRB sektor ini menempati posisi kedua setelah pertanian.

Di sektor jasa terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja ditahun 2017 bila dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 16,77 persen berbanding 15,79 persen. Sektor ini lebih banyak bergerak pada kegiatan pekerjaan informal sehingga tercipta pekerjaan-pekerjaan baru dan menyerap tenaga kerja yang tersedia di Kabupaten Pandeglang.

Tabel 5.3
Komposisi Penduduk Yang Bekerja Menurut
Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin Tahun 2017

Lapangan Usaha (1)	Persentase	
	Laki-laki (2)	Perempuan (3)
1. Pertanian	36,72	24,76
2. Industri Pengolahan	9,84	15,26
3. Perdagangan, HR	16,81	35,04
4. Jasa Kemasyarakatan	13,84	23,33
5. Lainnya*)	22,79	1,61
T o t a l	100,00	100,00
Jumlah	317.687	141.769

Sumber : Sakernas Tahun 2017

*) Lainnya: sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor LGA, sektor Konstruksi, sektor Angkutan/Transportasi serta sektor keuangan dan jasa perusahaan

Penyerapan terhadap tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan menunjukkan pola yang tidak terlalu berbeda. Tenaga kerja laki-laki yang terserap dalam sektor pertanian menempati posisi pertama yaitu 36,72 persen, namun tenaga kerja perempuan yang terserap dalam sektor pertanian menempati posisi kedua yaitu 24,76 persen. Distribusi penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan

memperlihatkan bahwa sektor informal cukup penting peranannya bagi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pandeglang. Proporsi mereka yang bekerja sebagai buruh/karyawan yang merupakan kategori status formal terhitung hanya sebesar 26,78 persen, angka ini meningkat dibandingkan tahun 2015 yang besarnya mencapai 21,04 persen.

Iklim usaha di Pandeglang terlihat sudah cukup kondusif, setidaknya terlihat dari tingginya persentase penduduk dengan status pengusaha pada tahun 2015. Penduduk yang masuk dalam kategori pengusaha pada tahun 2017 relatif cukup besar yaitu sekitar 43,60 persen, angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 39,63 persen.

Tabel 5.4
Komposisi Penduduk yang Bekerja
Menurut Status Pekerjaan
di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2015 dan 2017

Status Pekerjaan	2015	2017
(1)	(2)	(3)
I. Pengusaha	39,63	43,60
a. Berusaha Sendiri	18,45	24,43
b. Berusaha dibantu pekerja tak dibayar/tidak tetap	18,08	16,10
c. Berusaha dibantu buruh tetap	3,10	3,07
II. Buruh/Karyawan	21,04	26,78
III. Pekerja Bebas	26,23	22,45
IV. Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	13,10	7,16
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Sakernas, Tahun 2015 dan 2017

Terbatasnya lapangan pekerjaan pada sektor formal seperti buruh/karyawan pabrik dan pegawai negeri menyebabkan sektor informal berkembang dengan sendirinya. Meningkatnya pekerja sektor informal juga dapat mengindikasikan masih besarnya peluang usaha yang bisa dijalankan di Pandeglang, sehingga masyarakat berani untuk mencoba usaha

sendiri maupun berusaha dibantu karyawan tetap ataupun tidak tetap dari pada mencari pekerjaan pada orang lain. Hal ini mungkin yang menyebabkan persentase penduduk dengan status pengusaha cukup tinggi di Pandeglang.

Tabel 5.5
Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut
Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2017

Status Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
I. Pengusaha	44,15	42,37
a. Berusaha Sendiri	21,88	30,15
b. Berusaha dibantu pekerja tak dibayar/tidak tetap	18,78	10,09
c. Berusaha dibantu buruh tetap	3,49	2,13
II. Buruh/Karyawan	26,07	28,38
III. Pekerja Bebas	26,03	14,45
IV. Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	3,75	14,80
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Sakernas Tahun 2017

Status pekerjaan tenaga kerja laki-laki dan perempuan menunjukkan adanya perbedaan walaupun tidak setajam tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 status pengusaha pada tenaga kerja laki-laki cukup tinggi yaitu 44,15 persen, sedangkan pengusaha pada tenaga kerja perempuan sebesar 42,37 persen. Perbedaan di atas menunjukkan bahwa tenaga kerja laki-laki lebih banyak yang berusaha atau menjadi pengusaha dengan menanggung resiko dibandingkan tenaga kerja perempuan.

5.3. Angkatan Kerja Menurut Pendidikan

Sebagian besar penduduk yang bekerja di Kabupaten Pandeglang berpendidikan SD kebawah sebesar 58,95 persen. Demikian juga penduduk angkatan kerja yang pengangguran sebagian besar adalah lulusan SD kebawah sebesar 30,41 persen.

Tabel 5.6
Persentase Penduduk Yang Bekerja dan Pengangguran
Menurut Pendidikan di Kabupaten Pandeglang,
Tahun 2017

Pendidikan	Persentase Angkatan Kerja	
	Bekerja	Pengangguran
(1)	(2)	(3)
<= SD	58,95	30,41
SMP	18,79	28,57
SMA Umum	10,17	24,34
SMK Kejuruan	3,42	11,44
Diploma I/II/III	1,01	1,55
S1/S2/S3	7,66	3,69
T o t a l	100,00	100,00

Sumber : Sakernas Tahun 2017

Persentase penduduk yang bekerja dan pengangguran menurut pendidikan memberikan indikasi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan semakin besar tingkat penganggurannya. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk bekerja disektor yang tidak memerlukan pendidikan tinggi.

Salah satu kebutuhan dasar manusia selain pangan dan sandang adalah papan/fasilitas perumahan sebagai tempat tinggal/ tempat berlindung dan mempertahankan diri dari kondisi alam lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, maka permintaan/kebutuhan akan perumahan pun meningkat. Di sisi lain keterbatasan lahan untuk permukiman dan penawaran perumahan yang hanya tertuju pada suatu golongan masyarakat tertentu merupakan kendala bagi sebagian besar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan perumahan. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membangun perumahan yang layak huni, sementara tingkat pendapatan penduduk masih relatif rendah sehingga banyak rumah tangga/penduduk yang menempati rumah tidak layak huni baik dilihat dari sisi

kualitas rumah, lingkungan, kesehatan maupun ukuran luasnya.

Rumah tidak hanya merupakan tempat berlindung, tetapi fungsinya sebagai tempat tinggal lebih menonjol. Oleh karena itu berbagai aspek yang terkait dengan kondisi rumah seperti aspek kesehatan, kenyamanan serta estetika lingkungan masyarakatnya sangat menentukan dalam pemilihan rumah dan mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Kualitas rumah tempat tinggal secara umum ditentukan oleh jenis bahan bangunan yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Karena itu aspek kesehatan dan kenyamanan termasuk estetika bagi sekelompok masyarakat tertentu sangat menentukan dalam pemilihan rumah tinggal, semua ini terkait dengan tingkat kesejahteraan penghuninya. Selain kualitas rumah tinggal, tingkat kesejahteraan juga dapat dilihat dari fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan rasa nyaman bagi penghuninya. Pada tahun 2017 sebagian besar rumahtangga di Kabupaten

Pandeglang telah memiliki rumah tinggal sendiri yaitu sebesar 91,78 persen.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Pada tahun 2017 terhitung sebanyak 14,64 persen rumah tangga di Kabupaten Pandeglang menempati rumah yang relatif sempit, dengan ukuran kurang dari 10 m² per anggota rumah tangga (Tabel 7.1). Rumah tangga dengan kondisi demikian utamanya lebih banyak dijumpai di daerah pedesaan dan daerah-daerah perkotaan yang padat penghuni.

Kondisi rumah penduduk di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2017 sudah cukup membaik apabila dilihat dari jenis atap dan dinding yang digunakan. Rumah yang menggunakan atap terluas beton dan genteng sebesar 92,80 persen, sedangkan sisanya sebesar 7,20 persen masih menggunakan atap asbes, seng, dan daun-daunan, bahkan di daerah pedesaan hampir sebagian besar penduduk masih menggunakan atap rumah dari daun-daunan.

Sedangkan untuk jenis dinding yang menggunakan tembok pada tahun 2017 yaitu sebesar 57,33 persen.

Manusia dalam kehidupan sehari-harinya sangat membutuhkan akan air bersih untuk keperluan hidupnya. Ketersediaan air bersih dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Seperti terlihat pada tabel 6.1 persentase rumah tangga yang menggunakan air ledeng (termasuk air kemasan dan air isi ulang) di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2017 sebesar 31,17 persen, angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 16,34 persen.

Tabel 6.1
Persentase Rumah Tinggal Menurut Fasilitas
Perumahan di Kabupaten Pandeglang,
Tahun 2015-2017

Indikator Fasilitas Perumahan	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah Milik Sendiri	94,01	95,90	91,78
Lantai Terluas Bukan Tanah	92,84	93,26	91,62
Luas Lantai per kapita < 10 m ²	17,53	18,23	14,64
Atap Beton dan Genteng	89,79	86,34	92,80
Dinding Tembok	55,42	57,46	57,33
Air Minum Ledeng, Air Kemasan dan Air Isi Ulang	20,12	16,34	31,17
Bahan bakar Memasak :			
• Gas	46,83	49,87	55,83
• Minyak Tanah	-	-	-
• Kayu Bakar	52,23	49,94	43,56
• Lainnya	-	0,19	0,61
Menggunakan Fasilitas buang air besar	63,69	65,06	64,08
Listrik PLN dan Non PLN	99,61	99,81	99,83

Sumber : Susenas Tahun 2015-2017

Fasilitas rumah tinggal lainnya yang berkaitan erat dengan masalah kesehatan rumah tinggal adalah ketersediaan fasilitas sanitasi. Pada tahun 2017 lebih

dari separuh rumah tangga di Kabupaten Pandeglang sudah mempunyai fasilitas buang air besar baik itu kepemilikannya secara sendiri, bersama maupun umum. Ini merupakan perilaku hidup yang sehat khususnya bagi lingkungan karena bagi mereka yang tidak mempunyai tempat buang air besar cenderung akan melakukannya di sembarang tempat, yang pada akhirnya menjadi sumber timbulnya berbagai macam penyakit.

Untuk fasilitas penerangan sebagian besar penduduk Kabupaten Pandeglang pada tahun 2017 telah menggunakan listrik, baik listrik PLN maupun Non PLN yaitu sebesar 99,83 persen.

Setiap pembangunan yang dilaksanakan pada akhirnya selalu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbicara masalah kesejahteraan masyarakat, hal yang paling mudah untuk diingat adalah tingkat pendapatan masyarakat. Tingkat pendapatan masyarakat tentunya ada yang tinggi, sedang dan ada juga yang rendah. Biasanya sasaran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah mengangkat pendapatan masyarakat yang masih rendah agar pendapatannya meningkat.

Masyarakat atau penduduk dengan tingkat pendapatan yang rendah umumnya dikategorikan sebagai penduduk miskin karena dengan rendahnya pendapatan mereka belum/tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya (didekati dengan pengeluaran) lebih rendah dari yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Standar kebutuhan hidup layak tersebut

diterjemahkan sebagai suatu jumlah rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2.100 kilokalori sehari, ditambah sejumlah pengeluaran untuk bukan makanan seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Jumlah uang tersebut kemudian dikatakan sebagai batas garis kemiskinan.

Tinggi rendahnya angka jumlah penduduk miskin di suatu wilayah mencerminkan tingkat pendapatan penduduk pada wilayah tersebut. Tingginya jumlah penduduk miskin mengindikasikan rendahnya tingkat pendapatan penduduk. Jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat di suatu wilayah/daerah tertentu.

Disamping meningkatnya tingkat pendapatan, hal lain yang juga mengindikasikan tingkat kesejahteraan rakyat adalah bagaimana distribusi atau pemerataan pendapatan tersebut di berbagai lapisan masyarakat. Indikator distribusi pendapatan yang dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, dapat memberikan petunjuk mengenai

aspek pemerataan yang telah tercapai. Dari data pengeluaran dapat juga diungkapkan tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum dengan menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan.

7.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Kondisi masyarakat saat ini sangat rentan terhadap masalah kemiskinan. Gejolak sosial di bidang politik, buruknya keamanan, rusaknya distribusi barang dan jasa serta gejolak ekonomi makro bisa menjadi pemicu lonjakan angka kemiskinan. Di sisi lain buruknya akses pendidikan, kesehatan dan lingkungan bisa membuat mereka yang semula berada di atas garis kemiskinan terperosok ke dalam kategori penduduk miskin. Artinya masih banyak penduduk yang hidupnya hanya sedikit berada di atas garis kemiskinan (**Hampir Miskin**). Kelompok ini pun amat rentan terhadap perubahan harga. Oleh karena itu upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara **komprensensif**, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara lintas sektoral.

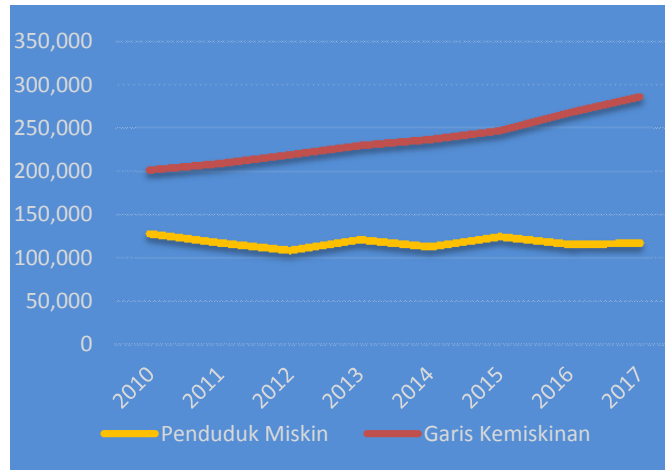
Tabel 7.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Pandeglang, Tahun 1999-2017

Tahun	Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)
1999	180.700	18,70	75.500
2000	198.983	19,80	84.725
2001	178.636	15,61	98.350
2002	157.291	15,11	105.402
2003	166.600	15,40	124.303
2004	151.500	13,77	133.300
2005	153.733	13,89	135.943
2006	177.895	15,82	144.543
2007	176.812	15,64	151.763
2008	165.242	14,49	162.059
2009	138.003	12,01	190.256
2010	127.800	11,14	202.483
2011	117.644	9,80	209.655
2012	109.100	9,28	219.592
2013	121.100	10,25	230.364
2014	113.140	9,50	237.111
2015	124.420	10,43	247.073
2016	115.900	9,67	267.752
2017	117.310	9,74	285.822

Sumber : Susenas Tahun 1999 – 2017

Jumlah penduduk miskin menurut hasil perhitungan BPS di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2017 masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 117.310 jiwa atau 9,74 persen penduduk Kabupaten Pandeglang berada di bawah garis kemiskinan yang besarnya Rp.285.822 per kapita per bulan. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2016 sebesar 9,67 persen. Dalam kurun waktu 1996-2017 seperti yang disajikan pada tabel 6.1, pada tahun 2000 merupakan angka tertinggi baik jumlah maupun persentase penduduk miskin di Kabupaten Pandeglang yaitu sebesar 198.983 jiwa atau sekitar 19,80 persen.

Gambar 7.1
Jumlah Penduduk Miskin dan Nilai Garis Kemiskinan
di Kabupaten Pandeglang, Tahun 2010-2017



Sumber : Susenas Tahun 2010 – 2017

Disamping tingkat pendapatan, tingkat kesejahteraan penduduk secara umum juga dapat dilihat dari pola konsumsi yang dilakukan oleh penduduk. Pola konsumsi secara umum dibagi menjadi konsumsi makanan dan non makanan. Apabila rata-rata pengeluaran konsumsi makanan penduduk lebih besar dari konsumsi non makanan, hal ini sebagai dampak dari masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah. Sebaliknya apabila persentase rata-rata konsumsi bukan makanan lebih besar atau meningkat, hal ini menunjukkan indikasi bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat sudah baik/meningkat.

Dari hasil Susenas tahun 2017, menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat Pandeglang untuk makanan masih lebih besar dibandingkan konsumsi bukan makanan, yaitu 58,35 persen untuk makanan dan 41,66 persen untuk bukan makanan. Hal ini terjadi

PENGELUARAN

karena pendapatan yang diterima oleh masyarakat masih pada level untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehingga konsumsi terhadap makanan lebih besar. Bila pendapatan yang diterima cukup besar maka masyarakat tidak hanya berfikir untuk membeli kebutuhan pokok saja (makanan) namun juga berfikir untuk membeli kebutuhan sekunder dan tersier seperti perumahan, pendidikan dan kesehatan yang pada umumnya termasuk dalam kelompok bukan makanan.

Rata-rata pengeluaran perkapita perbulan penduduk Pandeglang tahun 2017 sebesar Rp. 672.390,- yang terdiri dari Rp. 392.362,- untuk konsumsi makanan dan Rp. 280.028,- untuk konsumsi bukan makanan. Dari konsumsi makanan pengeluaran terbesar adalah untuk konsumsi padi-padian (makanan pokok), makanan dan minuman jadi dan rokok. Sedangkan dari konsumsi bukan makanan pengeluaran terbesar adalah untuk konsumsi perumahan serta barang dan jasa.

Tabel 8.1
Pengeluaran Rata-rata per Kapita per Bulan
Penduduk Kabupaten Pandeglang,
Tahun 2016-2017

Konsumsi	Pengeluaran (Rp)		Persentase	
	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	392.362		58,35	
Bukan Makanan	280.028		41,66	
Total	672.390		100,00	100,00

Sumber: Susenas Tahun 2016-2017

Dari pola konsumsi di atas menunjukkan bahwa pengeluaran yang dilakukan penduduk Pandeglang masih terfokus pada kebutuhan primer seperti bahan makanan pokok. Namun ada hal yang menarik, ternyata pengeluaran untuk rokok jauh lebih besar dari pengeluaran untuk pendidikan maupun kesehatan. Seringkali ketidakmampuan orangtua untuk menyekolahkan anak dikaitkan dengan ketidakmampuan dalam hal keuangan, di sisi lain untuk konsumsi tembakau atau rokok cukup besar. Dengan

PENGELUARAN

demikian kalau konsumsi rokok dikurangi, mungkin masalah keuangan untuk menyekolahkan anak sedikit bisa teratasi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Dikatakan cukup baik karena IPM merupakan indikator gabungan yang mencakup tiga indikator pembangunan yang dominan dan memiliki andil yang cukup besar dalam membentuk kualitas sumber daya manusia.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Jika ketiga dimensi tersebut memiliki kemajuan yang cukup berarti maka secara otomatis akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan.

Pada tahun 2010 UNDP (*United Nation Development Program*) memperkenalkan penghitungan IPM dengan metode baru. Alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM yaitu :

1. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan **antardaerah** dengan baik.
2. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
3. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Beberapa indikator yang berubah adalah Angka melek huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Sehingga tetap akan terbentuk tiga indikator IPM, yaitu : 1) Indikator Kesehatan yang digambarkan dengan Indeks Harapan Hidup, 2) Indikator Pendidikan (Indeks Harapan Lama Sekolah dan Indeks Rata-rata Lama Sekolah), dan 3) Indikator Ekonomi (Pengeluaran per kapita). Ketiga indikator tersebut dianggap dapat mengukur tingkat kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah.

9. 1. Indeks Kesehatan.

Dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara umum, indikator angka harapan hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*) dipilih sebagai salah satu komponen dalam penghitungan IPM untuk indikator bidang kesehatan.

Angka Harapan Hidup merupakan indikator penting dalam mengukur *longevity* (panjang umur)

yang menggambarkan derajat kesehatan masyarakat suatu daerah, karena semakin baik kesehatan seseorang maka kecenderungan untuk hidup lebih lama semakin tinggi dan sebaliknya semakin buruk kesehatan seseorang maka kecenderungan hidupnya pun semakin pendek, hal ini tentunya tidak terlepas dari kekuasaan Tuhan.

Untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan metode tidak langsung dengan menggunakan dua data dasar yaitu ; rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Prosedur penghitungan Angka Harapan Hidup sejak lahir (AHH_0) dilakukan dengan menggunakan *Software Mortpack Life*. Setelah mendapatkan angka harapan hidup sejak lahir, selanjutnya dilakukan penghitungan Indeksnya (Indeks Kesehatan) dengan cara membandingkan angka tersebut terhadap angka yang sudah distandarkan (dalam hal ini UNDP atau BPS telah menetapkan nilai minimum dan sasaran ideal untuk Angka Harapan Hidup, yaitu masing-masing 25 tahun dan 85 tahun.

$$\text{Indeks Kesehatan} = \frac{AHH_0 t - AHH_0 \text{ Min}}{AHH_0 \text{ Maks} - AHH_0 \text{ Min}}$$

Keterangan :

$AHH_0 t$ = Angka Harapan Hidup di tahun t

$AHH_0 \text{ Maks}$ = Angka Harapan Hidup Maksimal

$AHH_0 \text{ Min}$ = Angka Harapan Hidup Minimal

Pada tahun 2017, angka harapan hidup penduduk Pandeglang adalah 64,04 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa setiap penduduk **pandeglang** (bayi) yang lahir pada tahun 2017 mempunyai peluang/harapan untuk hidup selama 64,04 tahun. Indeks Kesehatan merupakan indeks dari IPM yang menggambarkan pembangunan manusia di bidang kesehatan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pencapaian pembangunan di bidang kesehatan baru mencapai 67,75 persen. Peningkatan angka Indeks kesehatan di atas juga menunjukkan tingkat kesehatan

penduduk Pandeglang semakin baik dari tahun sebelumnya.

Tabel 9.1
Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan
Komponen IPM di Kabupaten Pandeglang
Tahun 2016-2017

Indikator	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Harapan Hidup (Tahun)	63,77	64,04
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,40	13,41
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,62	6,63
Pengeluaran per Kapita Riil disesuaikan (Rp. 000)	8.138	8.358
IPM	63,40	63,82
<i>Peringkat se-Banten</i>	7	7

Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang

9.2. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan disusun oleh dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

9.2.1. Harapan Lama Sekolah (HLS) / *Expected Years of Schooling*

Harkat dan martabat manusia akan meningkat diantaranya apabila yang bersangkutan cerdas. Hidup sehat dan cerdas diyakini akan meningkatkan kemampuan produktivitas seseorang sehingga akan meningkatkan mutu peran warga tersebut sebagai pelaku (*agent*) pembangunan. Tingkat kecerdasan (*intelligence*) seseorang pada titik waktu tertentu merupakan produk gabungan dari keturunan (*heredity*), pendidikan dan pengalamannya.

$$HLS_a^t = \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan :

HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t

I = usia ($a, a+1, \dots, n$)

Indikator tingkat perkembangan pendidikan salah satunya dapat dievaluasi dengan melihat besarnya Harapan Lama Sekolah (HLS). Yang dimaksud dengan HLS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Pada tahun 2017 harapan lama sekolah Kabupaten Pandeglang sebesar 13,41 tahun.

9.2.2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) / *Mean Years of Schooling*

Dalam kaitannya dengan IPM ini, selain HLS juga terdapat indikator pendidikan lain yaitu rata-rata lama

sekolah (RLS). HLS dan RLS diharapkan mencerminkan tingkat pengetahuan dan keterampilan penduduk.

Pada tabel 9.1 terlihat bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Pandeglang pada tahun 2017 sebesar 6,63 tahun. Angka RLS ini tentunya harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah untuk sesegera mungkin melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan khususnya bidang pendidikan.

$$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah penduduk}_i$$

Keterangan :

RLS = Rata-rata Lama Sekolah di suatu wilayah

n = jumlah penduduk ($i = 1, 2, 3, \dots, n$)

Lama sekolah penduduk = lama sekolah penduduk ke- i di suatu wilayah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) **didefinisikan** sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas

dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

9.2.3. Indeks Pendidikan (HLS + RLS)

Indeks harapan lama sekolah dan indeks rata-rata lama sekolah digabung menjadi satu, sehingga diperoleh Indeks Pendidikan dengan formula sebagai berikut:

$$IPendidikan = \frac{\text{Indeks HLS} + \text{Indeks RLS}}{2}$$

Apabila hasil perhitungan indeks tersebut dikalikan 100 maka Indeks ini akan bernilai antara 0 (kondisi terburuk) sampai dengan 100 (kondisi terbaik). Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dapat menggambarkan tingkat perkembangan pembangunan bidang pendidikan. Kedua indikator tersebut dianggap cukup mewakili beberapa indikator pendidikan lainnya.

Pada tabel 9.2, terlihat bahwa Bidang Pendidikan yang terdiri dari Indeks HLS dan RLS mempunyai Indeks Pendidikan 59,35. Jadi pencapaian pembangunan bidang pendidikan tahun 2017 baru mencapai 59,35 persen dari pencapaian maksimal. Pencapaian indeks tersebut mengalami kenaikan cukup berarti jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 59,29 persen. Kenaikan angka tersebut dikarenakan salah satu dari kedua variabel pendidikan yaitu HLS dari tahun 2016-2017 mengalami peningkatan yaitu dari 13,40 persen menjadi 13,41 persen.

Tabel 9.2
Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya,
Kabupaten Pandeglang, Tahun 2015 – 2017

Komponen IPM	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kesehatan	66,94	67,34	67,75
Indeks Pendidikan	59,19	59,29	59,35
Indeks Pengeluaran	62,27	63,83	64,64

Sumber : BPS Kab Pandeglang

9.3. Indeks Tingkat Daya Beli (PPP)

Kemakmuran masyarakat tergantung kepada jumlah barang dan jasa yang berhasil disediakan oleh masyarakat bagi warganya. Dengan semakin banyaknya produksi masyarakat maka diperkirakan akan semakin makmur pula kehidupan warganya.

Tanpa mengecilkan arti kelemahan status penghasilan atau produksi per kapita sebagai indikator, maka dalam penghitungan IPM ini untuk mengukur standar hidup layak, data dasar PDRB Per Kapita tidak dapat digunakan karena bukan ukuran yang peka/dianggap kurang tepat untuk mengukur daya beli masyarakat. Untuk itu pada penghitungan IPM digunakan paritas daya beli masyarakat (*purchasing power parity*) yang bersumber dari konsumsi di Susenas yang menggambarkan Konsumsi Per Kapita Riil yang telah disesuaikan untuk mengukur kemampuan daya beli penduduk.

Dengan dimasukkannya variabel PPP kedalam penghitungan IPM, maka IPM jelas lebih "lengkap" dalam merefleksikan kondisi suatu masyarakat yang

memiliki peluang hidup panjang dan sehat serta memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Namun demikian, UNDP melihat bahwa kondisi seperti itu belum memberikan gambaran yang ideal. Menurutnya, masyarakat ideal selain harus memiliki peluang hidup panjang dan sehat serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, juga harus mempunyai peluang/kesempatan kerja/berusaha yang memadai sehingga akan memperoleh/menghasilkan sejumlah "uang" yang memiliki daya beli (*Purchasing Power*).

Besarnya nilai Indeks Tingkat Daya Beli (PPP), menunjukkan tingkat kemampuan daya beli penduduk. Semakin besar PPP, mengindikasikan kesejahteraan penduduk semakin membaik. Seperti terlihat pada tabel 9.1 dan tabel 9.2, tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari besarnya Indeks Daya Beli Penduduk. Tahun 2017, tingkat Daya Beli Penduduk sebesar Rp.8.358.000 rupiah dengan nilai indeks 64,64.

9.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebagai alat ukur tingkat pencapaian pembangunan manusia yang merupakan indeks gabungan dari tiga komponen 'penilai' kualitas sumber daya manusia. Jika ketiga komponen tersebut memiliki kualitas yang baik, maka secara otomatis sumber daya manusianya memiliki kualitas yang baik pula. Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan seberapa besar tingkat pencapaian dari pembangunan yang telah dilakukan selama ini dari bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Nilai Indeks Pembangunan Manusia adalah rata-rata dari ketiga indeks (Indeks Angka Harapan Hidup, Indeks Tingkat Pendidikan dan Indeks Pendapatan).

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

Keterangan :

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

$I_{kesehatan}$ = Indeks Kesehatan

$I_{pendidikan}$ = Indeks Pendidikan

$I_{pengeluaran}$ = Indeks Pengeluaran

Secara keseluruhan, sebagaimana terlihat pada tabel 9.1, tingkat keberhasilan pembangunan manusia Kabupaten Pandeglang pada tahun 2017 yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang digambarkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baru mencapai 63,82, kondisi ini mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2016 yang hanya sebesar 63,40.

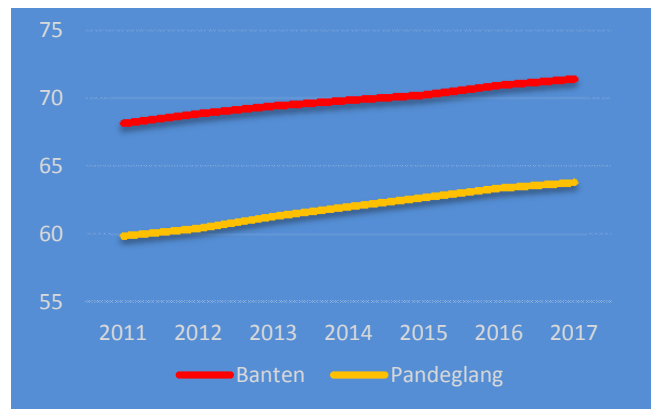
Tabel 9.3
Penggolongan skor/nilai IPM

Nilai IPM	Klasifikasi
IPM \geq 80 70 \leq IPM \leq 80 60 \leq IPM \leq 70 IPM < 60	Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah

Bila dibandingkan dengan kabupaten lain sebagaimana tergambar dalam tabel 9.1, maka pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2017 berada di peringkat 7 dari 8 Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, yaitu satu peringkat di atas Kabupaten Lebak.

Pembangunan manusia di Kabupaten Pandeglang dengan nilai IPM dan posisi yang dicapainya masih berada di bawah nilai IPM Provinsi Banten. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Pandeglang di bawah rata-rata pembangunan manusia di Provinsi Banten. Kiranya perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk meningkatkan kinerjanya agar pembangunan manusia di Kabupaten Pandeglang lebih baik lagi.

Gambar 9.1
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Pandeglang dan
Provinsi Banten Tahun 2011-2017



Sumber : BPS Kabupaten Pandeglang

Salah satu ciri era globalisasi yaitu semakin pesatnya pertumbuhan akses teknologi informasi dan komunikasi, yang dicerminkan melalui penggunaan telepon, telepon seluler, komputer, dan akses internet. Perkembangan teknologi telah menciptakan telepon seluler yang lebih praktis dibandingkan telepon dengan kabel. Pada tahun 2017 persentase penduduk berumur 5 tahun keatas yang menggunakan telepon seluler (HP) sebesar 57,37 persen, sementara yang memiliki telepon seluler (HP) sebesar 46,30 persen.

Tahun 2017, tercatat persentase rumah tangga yang menggunakan komputer sebesar 10,07 persen. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi selama ini telah merubah perilaku masyarakat dalam mengakses informasi dan berkomunikasi.

Tabel 10.1
Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas menurut
Karakteristik Penggunaan Teknologi Informasi di
Kabupaten Pandeglang Tahun 2017

Karakteristik	Persentase (%)
(1)	(2)
Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel	57,37
Memiliki Telepon Seluler (HP)/Nirkabel	46,30
Menggunakan Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet)	10,07
Menggunakan internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp)	17,64

Sumber : Susenas Tahun 2017

Masyarakat kini cenderung memilih telepon seluler karena praktis, dapat dibawa bepergian kemana-mana, lebih bersifat pribadi, dan tersedianya kecanggihan teknologi dalam telepon seluler yang dapat mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, menyimpan gambar (foto) dan video, serta merekam gambar dan suara, dan lain-lain.

Aplikasi terhadap teknologi komunikasi dan informasi salah satunya adalah akses internet. Media internet digunakan karena memiliki sifat instan, interaktif dan menarik. Pada tahun 2017, secara umum persentase penduduk berumur 5 tahun keatas yang menggunakan internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp) sebesar 17,64 persen.

Tabel 10.2
Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas menurut apa saja yang digunakan untuk mengakses internet di Kabupaten Pandeglang Tahun 2017

Karakteristik	Persentase (%)
(1)	(2)
menggunakan komputer desktop	19,59
menggunakan laptop/note book	13,61
menggunakan tablet	0,88
menggunakan HP/ponsel	92,66
menggunakan sarana lainnya	0,39

Sumber : Susenas Tahun 2017

Penduduk berumur 5 tahun keatas yang mengakses internet sebanyak 92,66 persen menggunakan HP/ponsel. Dilihat dari tujuan

mengakses internet, sebanyak 82,04 persen mengakses internet untuk jejaring sosial (medsos).

Tabel 10.3
Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas menurut
untuk apa saja mengakses internet
di Kabupaten Pandeglang Tahun 2017

Karakteristik	Persentase (%)
(1)	(2)
mendapat informasi/berita	48,28
mengerjakan tugas sekolah/kuliah	23,85
mengirim/menerima e-mail	15,53
media/jejaring sosial	82,04
pembelian barang/jasa	3,09
penjualan barang/jasa	1,74
hiburan	43,27
fasilitas finansial	1,70
mendapat informasi mengenai barang/jasa	3,07
lainnya	4,41

Sumber : Susenas Tahun 2017

Jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang tahun 2017 sebanyak 1.205.203 jiwa yang terdiri dari 615.297 laki-laki dan 589.906 perempuan. Berdasarkan data tersebut, rata-rata kepadatan penduduk sekitar 4,25 jiwa/Km² dan sex rasio sebesar 104,30.

Tingkat kesehatan penduduk pandeglang tahun 2017 menunjukkan peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya angka harapan hidup (AHH) dibanding tahun sebelumnya yaitu 63,77 tahun pada tahun 2016 menjadi 64,04 tahun (tahun 2017). Pada tahun 2017 angka kesakitan sebesar 16,57 persen dan rata-rata lama sakit pada tahun 2017 sebesar 7,14 hari.

Tingkat pendidikan masyarakat Pandeglang pada umumnya masih relatif rendah khususnya pencapaian tingkat pendidikan formal. Persentase penduduk Pandeglang yang melek huruf tahun 2017 sudah cukup tinggi yaitu mencapai 95,43 persen yang berarti bahwa masih terdapat penduduk yang buta huruf sebanyak 4,57 persen. Untuk rata-rata lama sekolah penduduk

Kabupaten Pandeglang tahun 2017 sebesar 6,63 tahun, dengan kata lain rata-rata penduduk pandeglang telah menamatkan jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) namun belum merubah tingkat pendidikan yang pernah diduduki yaitu tetap pada kelas 1 SLTP.

Partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Pandeglang tahun 2017 sudah cukup mengembirakan khususnya untuk jenjang sekolah dasar (7-12 tahun) yang sudah mencapai 99,19 persen. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SLTP dan SLTA harus mendapat perhatian yang lebih serius lagi karena masing-masing baru mencapai 93,54 persen dan 53,95 persen.

Tingkat pengangguran yang tinggi di Kabupaten Pandeglang merupakan masalah yang cukup serius sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. Pada tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,30 persen, angka ini mengalami penurunan dibanding tahun 2015 yang besarnya 10,22 persen.

Di bidang perekonomian perlu perhatian ekstra dari pemerintah daerah sehubungan dengan masih tingginya persentase penduduk miskin yang mencapai

9,74 persen pada tahun 2017. Tingkat kesejahteraan yang masih rendah dapat terlihat dari pola konsumsi masyarakat Kabupaten Pandeglang dimana konsumsi makanan jauh lebih tinggi dibanding konsumsi non makanan yang berarti masih mementingkan kebutuhan perutnya dibandingkan kebutuhan yang lainnya.

Kualitas perumahan dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Pada tahun 2017 sekitar 91,78 persen penduduk Kabupaten Pandeglang menempati rumah milik sendiri, namun demikian dari jumlah tersebut baru 85,36 persen saja yang mempunyai rumah dengan luas lantai lebih dari 10 m2 **perkapita** dan baru 64,08 persen yang mempunyai tempat buang air besar.

Apabila dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pada tahun 2017 IPM Kabupaten Pandeglang sebesar 64,04 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016 yang hanya sebesar 63,40. Ini berarti tingkat pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Pandeglang berada pada posisi IPM menengah atas. Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten, IPM

Kabupaten Pandeglang tahun 2017 berada pada urutan ketujuh (satu tingkat di atas Kab.Lebak) dari 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang ada. Kondisi ini masih sama dibanding tahun sebelumnya dimana pada tahun 2016 IPM Pandeglang berada pada urutan ketujuh.

Pada tahun 2017, secara umum persentase penduduk berumur 5 tahun keatas yang menggunakan internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp) sebesar 17,64 persen. Sebanyak 92,66 persen menggunakan HP/ponsel dalam mengakses internet. Dilihat dari tujuan mengakses internet, sebanyak 82,04 persen mengakses internet untuk jejaring sosial (medsos).